

**PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PADA BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG**

Studi Evaluatif Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pada Bagian Pengelola Data
Elektronik di Kabupaten Malang

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RENDITYA SILVANIE PUTRIE

0410313097



**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2008

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang (Studi Evaluatif Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pada Bagian Pengelola Data Elektronik di Kabupaten Malang)

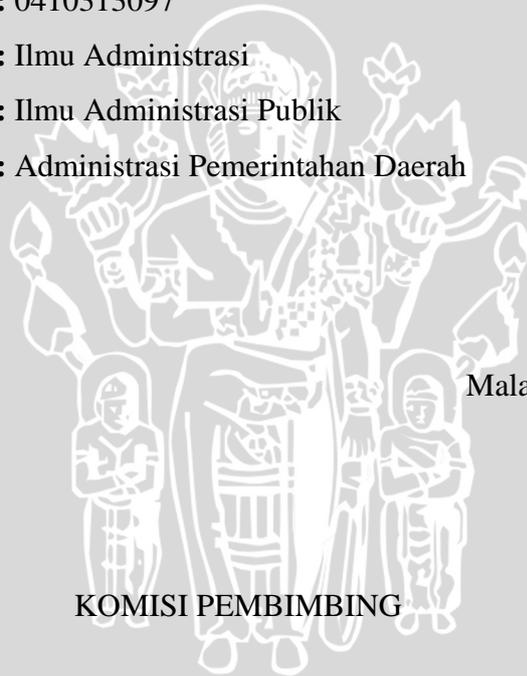
DISUSUN OLEH : Renditya Silvanie Putrie

NIM : 0410313097

FAKULTAS : Ilmu Administrasi

JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik

KONSENTRASI : Administrasi Pemerintahan Daerah



Malang, 2008

KOMISI PEMBIMBING

KETUA

ANGGOTA

Prof. Drs. ISMANI H.P.,M.A.

NIP. 130 355 390

MARDIYONO, Dr,MPA.

NIP. 130 704 330

TANDAN PENGESAHAN

Telah disahkan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 November 2008

Jam : 09.00

Skripsi atas nama : Renditya Silvanie Putrie

Judul : Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang (Studi Evaluatif Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pada Bagian Pengelola Data Elektronik di Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Prof. Drs. ISMANI H.P.,M.A.

Ketua

Dr. MARDIYONO,MPA.

Anggota

Drs. BAMBANG SUPRIYONO, MS

Anggota

Drs. ANDI FEFTA W,MDA, Ph.D

Anggota

RINGKASAN

Renditya Silvanie Putrie, 2008. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG (Studi Evaluatif Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pada Bagian Pengelola Data Elektronik di Kabupaten Malang):

Prof. Drs. ISMANI H.P.,M.A.; Dr. MARDIYONO, MPA (97hal + i - ix)

Teknologi informasi merupakan pengembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi komunikasi. Basuki (1998 : h.15) mendefinisikan teknologi informasi sebagai penggunaan teknologi untuk pengadaan, penyimpanan, temu balik, analisis, dan komunikasi informasi dalam bentuk data numerik, teks atau tekstual, citra atau suara, terutama dengan menggunakan mikroprosesor beserta berbagai aspeknya. Dalam teknologi informasi terdapat dua komponen utama yaitu komputer dan telekomunikasi.

Sejak tahun 1980-an, peran pemerintah mengalami suatu proses perubahan transisional dari karakteristik pengolahan public yang berbasis pada kekuasaan tanpa adanya suatu pertanggungjawaban kinerja kearah pengelolaan public yang berbasis pada kekuasaan pengguna jasa dari peran sebagai penyelenggara (*acting*) kearah pengarah (*regulating*) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dari kultur yang tertutup menuju ke sebuah tatanan organisasi yang terbuka, desentralistik, dan demokratis, serta dari suatu pemerintahan yang *bad governance* ke arah suatu pemerintahan yang *clean dan good governance*.

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dewasa ini yang diaplikasikan untuk beraneka ragam kepentingan adalah internet yang merupakan jaringan komputer global. Internet sangat bermanfaat karena mempermudah para penggunanya untuk berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak dan mempermudah perolehan informasi yang dibutuhkan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta dalam tempo yang singkat. Bagi instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan internet terutama yang dimaksudkan untuk mendukung layanan public sering disebut *electronic government* (Setiyadi 2003).

Dalam pengelolaan teknologi informasi diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih lagi realitas saat ini, dimana dunia memasuki era globalisasi yang menghadapkan pemerintah daerah pada kondisi persaingan yang sangat tajam tidak hanya dalam ruang lingkup lokal, regional tetapi juga global. Persaingan yang terjadi mengharuskan pemerintahan daerah untuk merubah dan menggeser fungsi – fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administratif semata seperti perekrutan pegawai , staffing, koordiating yang dilakukan oleh kepegawaian. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi di dalam organisasi menjadi aliansi strategik kerja sama. Bersama–sama bagian lainnya mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi pemerintahan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Studi Pada Penanganan Bencana Vulkanik Gunung Kelud Tahun 2007 di Kecamatan Ngantang dan Kasembon Kabupaten Malang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak. Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab MA.PhD Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak. Dr. Imam Hanafi S.Sos. M.Si (MAB) Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
4. Bapak Prof. Drs. ISMANI H.P.,M.A.selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak MARDIYONO, Dr,MPA. selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Seluruh pegawai Bagian Pengelolaan Data Elektronik yang telah membantu saya dalam mencari data-data skripsi ini.
7. Ayahanda Handoko dan Ibunda Roose Muntiana Mary serta adik yang telah memberikan dukungan moril dan spirituil yang sangat berharga.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman FIA Publik tahun 2004 yang ikut serta membantu dan memberikan semangat serta dukungannya dalam penyelesaian Skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Malang, Oktober 2008

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO
TANDA PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN i
SUMMARY iii
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABELx
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Kontribusi Penelitian 8
1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah 11
 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah 11
 2.1.2 Desentralisasi 12
 2.1.3 Konsep Otonomi Daerah 14
 2.1.4 Hakekat Otonomi Daerah 15
2.2 Sumber Daya Aparatur 16
 2.2.1 Pengertian Sumber Daya Aparatur 16
 2.2.2 Aparatur Daerah 17
 2.2.3 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 19
 2.2.4 Evaluasi Kinerja Sumber Daya Aparatur 22
2.3 Sistem Informasi 24
 2.3.1 Definisi Sistem Informasi 24
 2.3.2 Sistem Informasi Berbasis Komputer 26
 2.3.3 Internet 28
2.4 Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan 30
 2.4.1 Teknologi Informasi 30
 2.4.2 Peranan Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan 31



2.5	Elektronik Government.....	33
2.5.1	Definisi Elektronik Government.....	33
2.5.2	Tipe Relasi Elektronik Government.....	35
2.5.3	Jenis-Jenis Pelayanan Pada Elektronik Government.....	37
2.5.4	Kriteria Situs Web Pemerintah Daerah.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Fokus Penelitian.....	43
3.3	Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
3.4	Sumber Data.....	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6	Instrumen Penelitian.....	46
3.7	Rancangan Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1	Gambaran Umum Tentang Kabupaten Malang.....	50
4.1.2	Keadaan Umum.....	52
4.1.3	Gambaran Umum Bagian Pengelolaan Data Elektronik.....	53
4.1.4	Visi dan Misi Bagian Pengelolaan Data Elektronik.....	54
4.1.5	Dasar Hukum Kebijakan Program Pembangunan dan Pengembangan Bagian Pengelola Data Elektronik.....	55
4.1.6	Tugas Pokok Bagian Pengelola Data Elektronik.....	55
4.1.7	Fungsi Bagian Pengelola Data Elektronik.....	55
4.1.8	Struktur Organisasi.....	56
4.1.9	Rencana Pembangunan dan Pengembangan.....	59
4.1.10	Kondisi sumber Daya Manusia Bagian Pengelola Data Elektronik.....	60
4.1.11	Prasarana Bagian Pengelola Data Elektronik.....	62

4.2 Penyajian Data

4.2.1	Visi Misi Pengelolaan Data Elektronik di Kabupaten Malang.....	64
4.2.2	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bagian Pengelolaan Data Elektronik.....	66
4.2.2.1	Bentuk Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	66
4.2.2.2	Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	67
4.2.2.3	Tipologi Jaringan.....	70
4.2.2.4	Pengolahan Informasi Pada Media Komunikasi Pemerintah Kabupaten Malang.....	71
4.2.2.5	Rekapitulasi Peremajaan data Web.....	77
4.2.2	Peran Sumber Daya Aparatur.....	79
4.2.3	Evaluasi Kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang.....	80

4.3 Analisis Data

4.3.1	Gambaran Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Malang.....	82
4.3.2	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditinjau Dari Interaksi <i>e-Government</i> di Kabupaten Malang.....	83
4.3.2.1	Pola Hubungan Pemerintah Dengan Bisnis.....	83
4.3.2.2	Pola Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat.....	85
4.3.2.3	Pola Hubungan Pemerintah Dengan Pemerintah.....	87
4.3.3	Sumber Daya aparatur.....	89
4.3.3.1	Peran Sumber Daya Aparatur Dalam Pengolahan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	89

4.3.3.2 Pengembangan Sumber Daya Aparatur Untuk Menunjang
Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....90

4.3.4 Evaluasi Kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik.....91

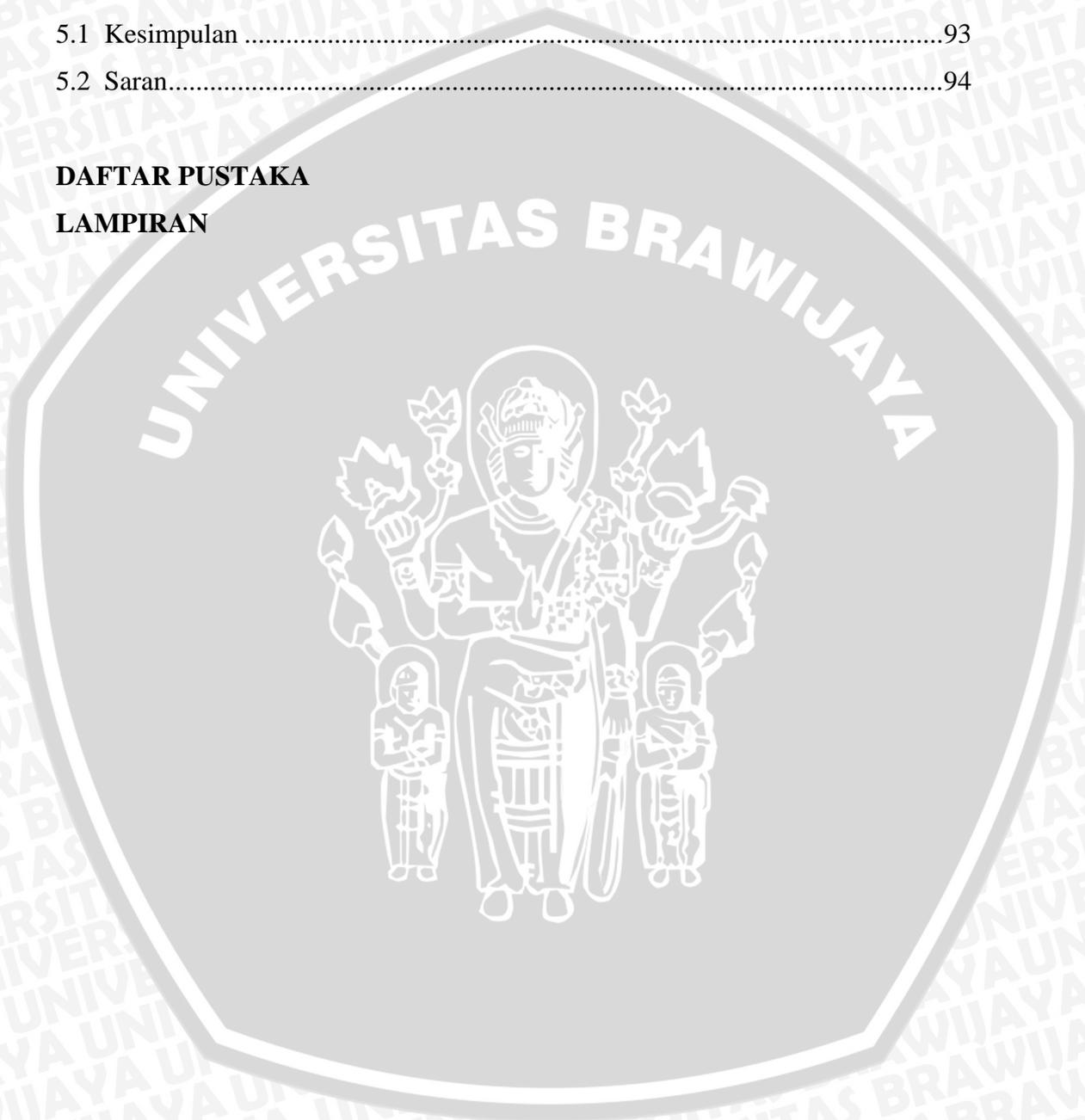
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan93

5.2 Saran.....94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	Hal
1	Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Jabatan	60
2	Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Tingkat Pendidikan	61
3	Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Tingkat Golongan	61
4	Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Spesifikasi SDM	62
5	Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Telematika	67
6	Rekapitulasi Peremajaan Web	77
7	Evaluasi Kinerja	79
8	Klasifikasi berdasarkan isi dalam “Surat Warga”	86

Rekapitulasi Peremajaan Web

DAFTAR GAMBAR / BAGAN

NO	JUDUL	Hal
1	Model Dasar Sistem Informasi Ditambah Penyimpanan Data	26
2	Analisis Data Model Interaktif	48
3	Peta Kabupaten Malang	51
4	Struktur Organisasi Bagian PDE	56
5	Tipologi Jaringan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Malang	70
6	Tampilan Situs Web Pemerintah Daerah	71



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Administrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh Pfiffner dan Presthus (1953), adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik. Bertolak dari gagasan dasar tersebut, dapat diyakini bahwa administrasi publik dapat berperan positif dalam pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-citakan, karena pada dasarnya administrasi publik berurusan dengan persoalan bagaimana menentukan sesuatu. Administrasi publik bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses pembangunan, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Dalam wacana administrasi public baru (*new public administration*) teknologi informasi ditempatkan sebagai variable utama dalam mendukung terlaksananya administrasi public yang efisien, efektif, dan akuntabel. Kehadiran teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir telah membuktikan bahwa dia mampu memberikan “sesuatu” yang semula sangat sulit dipenuhi oleh administrasi public tradisional yakni dalam hal kecepatan, keakuratan, dan keobjektifannya. Dengan kata lain, teknologi informasi telah diyakini menjadi *enabler factor* untuk mewujudkan suatu administrasi yang bebas dari pengaruh hubungan personal.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang tersebut Pada Pasal 9 telah disebutkan bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Dari pasal ini jelas ada pembatasan bagi daerah dalam menjalankan wewenangnya. Dalam hal penerapan teknologi informasi dan komunikasi jelas termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah.

Teknologi informasi merupakan pengembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi komunikasi. Basuki (1998 : h.15) mendefinisikan teknologi informasi sebagai penggunaan teknologi untuk pengadaan, penyimpanan, temu balik, analisis, dan komunikasi informasi dalam bentuk data numerik, teks atau tekstual, citra atau suara, terutama dengan menggunakan mikroprosesor beserta berbagai aspeknya. Dalam teknologi informasi terdapat dua komponen utama yaitu komputer dan telekomunikasi.

Sejak tahun 1980-an, peran pemerintah mengalami suatu proses perubahan transisional dari karakteristik pengolahan public yang berbasis pada kekuasaan tanpa adanya suatu pertanggungjawaban kinerja kearah pengelolaan public yang berbasis pada kekuasaan pengguna jasa dari peran sebagai penyelenggara (*acting*) kearah pengarah (*regulating*) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dari kultur yang tertutup menuju ke sebuah tatanan organisasi yang terbuka, desentralistik, dan demokratis, serta dari suatu pemerintahan yang *bad governance* ke arah suatu pemerintahan yang *clean dan good governance*.

Kesadaran akan pentingnya penggunaan sistem informasi dengan pendekatan teknologi mutakhir yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi komputer telah melahirkan kebutuhan akan sistem informasi berbasis komputer atau *Computer Based Information Sistem (CBIS)* yang bukan hal baru lagi pada saat ini, komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi sehingga komputer dipandang sebagai salah satu produk dalam domain teknologi informasi (Indrajit, 2002:h.2).

Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu sistem informasi yang menempatkan perangkat pengolahan data komputer dalam kedudukan yang penting. Parker dalam Kumorotomo dan Subandono (2004:h.16) mengungkapkan bahwa suatu sistem informasi yang berbasis komputer (CBIS) terdiri dari manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak dalam maupun luar organisasi yang berkompeten.

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dewasa ini yang diaplikasikan untuk beraneka ragam kepentingan adalah internet yang merupakan jaringan komputer global. Internet sangat bermanfaat karena mempermudah para penggunanya untuk berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak dan mempermudah perolehan informasi yang dibutuhkan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta dalam tempo yang singkat. Bagi instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan internet terutama yang dimaksudkan untuk mendukung layanan public sering disebut *electronic government* (Setiyadi 2003).

Di Indonesia, pelaksanaan *e-Government* sebenarnya telah dimulai sebelum otonomi daerah pada tahun 1992 melalui prakarsa Departemen Dalam Negeri Nomor. 45 Tahun 1992 tentang Pokok – Pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI). Didalamnya termasuk sistem informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA).

Pemerintah juga mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* melalui Inpres Nomor. 3 Tahun 2003 sebagai upaya mengimplementasikan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup yaitu : (1) Pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronis, (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.

Inpres Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, mengemukakan pentingnya penerapan *e-government*. Faktor kunci pengembangan *e-government* meliputi : (1) Support merupakan elemen yang harus dimiliki pemerintah daerah, karena tanpa adanya unsure ini mustahil inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan, (2) Capacity yang dimaksud dengan elemen ini adalah kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan *e-government*, (3) Value berbagai inisiatif *e-government* tidak ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malang berupaya merintis pemanfaatan, pengembangan dan investasi teknologi untuk mewujudkan *e-government*. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi *e-government* maka Bupati Malang memberikan wewenang *e-government* kepada Bagian Pengelola Data Elektronik. *E-government* di Kabupaten Malang telah mengembangkan internet dan internet antar dinas/instansi, operasional jaringan internet di beberapa kelurahan dan kecamatan, serta pembuatan *website*.

Istilah internet berasal dari bahasa latin *inter*, yang berarti “antara”. Internet berarti jaringan antara atau penghubung. Itulah fungsi internet menghubungkan jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sehingga mereka dapat berkomunikasi. Penemuan internet dimulai dari tahun 1969 dimana ARPA (*Advanced Research Project Agency*), yang

merupakan proyek Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang menciptakan jalur komunikasi untuk memudahkan kerjasama antar badan riset di seluruh negeri. Pada awalnya hanya melakukan data pada computer sejenis, dengan bertambahnya computer dengan berbagai system operasi menuntut komunikasi yang tekterbatas antar semua badan yang tergabung dalam jaringan. Untuk itu dibuat *Internetting Project*, yang mengembangkan lebih lanjut hasil yang telah dicapai dalam ARPANet, agar media komunikasi baru ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai system computer yang tergabung. Semakin banyaknya jaringan computer untuk berbagai macam kebutuhan sehingga terciptalah INTERNET.

Pemerintah Kabupaten Malang menyadari bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet yang terintegrasi dalam satu kesatuan system merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, dalam rangka pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, akurat dan aman. Oleh karena itu, melalui Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang berusaha mengembangkan infrastuktur jaringan “Malang *Online*” sebagai wadah implementasi dari *Information Communication Technology*, yang merupakan jaringan system informasi dan komunikasi terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Upaya pengembangan infrastruktur jaringan dan pengembangan *website* tersebut dapat telaksana dengan baik apabila ditunjang dengan ketersediaan perangkat keras yang dapat mendukung kinerja system informasi dan komunikasi serta sumber daya aparatur sebagai pembuat *website*. Banyaknya pemerintah daerah yang kini berlomba-lomba membuat *website*, namun setelah hadir situs tetap tidak bisa memberikan informasi yang detail. Baik untuk dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat maupun kalangan bisnis.

Keterbatasan memberikan informasi melalui *website* disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur sebagai pencipta *website*. Sumber daya aparatur merupakan salah satu aset terpenting bagi organisasi pemerintah. Peranan sumber daya manusia bagi organisasi tidak hanya

dilihat dari hasil produktifitas kerja tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keunggulan daya saing manusianya, bukan ditentukan lagi oleh sumber daya alamnya. Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia suatu negara akan semakin kuat daya saing negara tersebut.

Terlebih lagi realitas saat ini, dimana dunia memasuki era globalisasi yang menghadapkan pemerintah daerah pada kondisi persaingan yang sangat tajam tidak hanya dalam ruang lingkup lokal, regional tetapi juga global. Persaingan yang terjadi mengharuskan pemerintahan daerah untuk merubah dan menggeser fungsi – fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administratif semata seperti perekrutan pegawai , staffing, koordiating yang dilakukan oleh kepegawaian. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi di dalam organisasi menjadi aliansi strategik kerja sama. Bersama–sama bagian lainnya mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi pemerintahan.

Amanat Undang – Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintahan secara substansi menekankan bahwa sumber daya aparatur / PNS hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan, pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat , dan dituntut netral dari kepentingan politik maupun golongan .

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam berproduktifitas secara efektif dan efisien, perlu dilakukan peningkatan pendidikan dan pemberian pelatihan. Sehingga dengan meningkatnya kemampuan karyawan diharapkan produktifitas karyawan dapat ditingkatkan secara optimal yang pada akhirnya akan sangat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG** Studi Evaluatif Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pada Bagian Pengelola Data Elektronik di Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dilakukan dengan diadakannya pengembangan teknologi informasi diberbagai daerah dengan dibangunnya *website* kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Demikian halnya di Kota Malang melalui Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang berusaha membangun Jaringan “Malang *Online*” yang merupakan wadah dari teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan jaringan system informasi dan komunikasi yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk memberikan informasi melalui jaringan “Malang *Online*”. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Bagian Pengelola Data Elektronik dalam pemerintahan?
2. Bagaimanakah peran sumber daya paratur dalam mendukung pelaksanaan penerapan teknologi informasi dan komunikasi?
3. Bagaimanakah evaluasi kinerja pada Bagian Pengelola Data Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sekiranya berasal dari adanya permasalahan ataupun fenomena tertentu yang terjadi dalam kehidupan manusia yang mencari untuk diteliti secara mendalam dengan harapan dihasilkannya pemecahan masalah tersebut. Untuk itu tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, mengintepretasikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Malang
2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, mengintepretasikan peran sumber daya aparatur pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Untuk mendiskripsikan, menganalisis mengintepretasikan evaluasi kinerja yang dilakukan pada Bagian Pengelola Data Elektronik

1.4 Kontribusi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada aspek teoritis dan aspek praktis

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian dan untuk membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktek administrasi public pada khususnya.
 - b. Sebagai wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi masyarakat agar mengetahui dan lebih memahami pemanfaatan jaringan “Malang *Online*” melalui website resmi Kabupaten Malang

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengembangkan jaringan “Malang *Online*” sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
- c. Bagi Kantor Arsip dan Pengelolaan Data Elektronik penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya serta membangun dan mengembangkan jaringan “Malang *Online*” yang merupakan implementasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan jaringan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari penulisan skripsi ini secara sistematis akan diuraikan gambaran masing – masing bab sebagai berikut :

BAB I : Memuat pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian.

BAB II: Memuat tinjauan pustaka. Bab ini menyajikan teori/pendapat ilmuwan yang relevan dan menjadi landasan pemikiran skripsi ini diantaranya mengenai pemerintah daerah, teknologi informasi, system informasi, *e-government*, dan sumber daya aparatur.

BAB III: Membahas tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, focus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisa data, dan keabsahan data.

BAB IV: Memuat penyajian hasil penelitian, analisa dan intepretasi data. Bab ini membahas tentang penyajian data yang diperinci dengan gambaran umum objek penelitian, struktur organisasi, tugas pokok serta pembahasan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten

Malang.

BAB V: berisi penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penulisan skripsi, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dipandang perlu guna perbaikan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah daerah

Hakekat penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintah perlu didekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan/kekuasaan kepada pemerintah daerah (*sharing of power*) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, *sharing of power* terjadi secara vertical antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan – kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di pemerintah daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya (Fitriyah : h.103). hasil dari adanya *Sharing of power* ini diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih memuaskan.

Istilah pemerintah daerah sering digunakan berdampingan dengan kata *local government*. Kaho (1991) menggambarkan *local government* sebagai :

“bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang –Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya”(Kaho dalam Fitriyah,2001:h.112).

Berikutnya, (Hossein dalam Muluk,2005:h.10) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan konsep yang dapat mengandung tiga pengertian sebagai berikut:

1. Pemerintah local yang seringkali dipertukarkan dengan *Local Authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah.
2. Mengacu pada pemerintah local yang dilakukan oleh pemerintah setempat (mengacu pada fungsi).
3. Bermakna daerah otonom.

Pemerintah daerah di Indonesia terangkum dalam sebuah Negara kesatuan karena Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republic, yang secara administrative dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dimana daerah provinsi tersebut akan dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kota dan kabupaten. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah otonom yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

2.1.2 Desentralisasi

Desentralisasi muncul atas dasar pemikiran bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dan memihak kepada rakyat, selain juga mengakomodasikan permintaan otonomi daerah yang lebih luas. Terpenuhinya tuntutan ini mengakibatkan bukan tidak mungkin legitimasi pemerintah pusat akan semakin menguat dan sekaligus menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan territorial khususnya bagi Negara yang bersifat heterogen secara etnis dan kultur serta persebaran wilayah yang luar biasa besar seperti Indonesia.

Definisi tentang desentralisasi dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Anglo Saxon dan kelompok Kontinental.

1. Kelompok Anglo Saxon

Kelompok Anglo Saxon dalam Jimung (2005:h.29) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut devolusi. Devolusi diartikan sebagai pemberian sebagian kekuasaan yang diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun secara administrative.

Sementara menurut Corolie Bryant dan Louis G.With dalam Jimung (2005:h.29) menegaskan bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan disentralisasi politik. Desentralisasi administrasi merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan pejabat pusat ditingkat local. Sebaliknya desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan local, dengan tujuan untuk pemberdayaan local.

2. Kelompok Kontinental

Menurut R.Tresna dalam Jimung (2005:h.30) desentralisasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: *Amtalijke Decentralitie* (Desentralisasi jabatan) atau dekonsentrasi dan *Staatskundige* (Desentralisasi Ketatanegaraan) yang dibagi dalam desentralisasi territorial dan disentralisasi fungsional.

Desentralisasi jabatan adalah pemberian atau penyerahan kekuasaan dari atas kebawah (*Up-Dwon*) dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah didalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara

Sementara itu, menurut Amran Muslimin dalam Jimung (2005:h.30) desentralisasi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional, adalah pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu.
3. Desentralisasi Kebudayaan, merupakan pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan dan agama.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan, baik yang bersifat politis maupun administrative dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2.1.3 Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah mekanisme pemberdayaan masyarakat daerah, yaitu daerah mempunyai kekuasaan untuk mengontrol dirinya melalui pembuatan kebijakan public (Fitriyah,2001:h.111). selanjutnya Fitriyah mengungkapkan adanya aspek positif keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan public, yaitu menjadikan masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kebijakan public itu sendiri.

Disamping itu, otonomi daerah lebih menjamin terakomodasinya berbagai kepentingan local, karena pemerintah daerah tidak bias begitu saja mengabaikan aspirasi masyarakat local.

Berdasarkan pengertian dan beberapa karakteristik tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah tersebut segala urusan daerah menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah.

2.1.4 Hakekat Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan upaya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah dalam rangka pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah dalam kerangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara pemerintah dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi diarahkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah antara lain untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dengan demikian, hakekat otonomi daerah berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah mengurus rumah tangganya sendiri dan lebih menitikberatkan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan fisik, ketentraman, dan ketertiban umum

2.2 Sumber Daya Aparatur

2.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya yang terdapat didalam organisasi biasa dikelompokkan atas dua macam yaitu : sumber daya manusia (human resource) dan sumber daya non manusia (non human resource).

Secara umum telah diakui bahwa peran manusia dalam suatu organisasi merupakan factor penentu berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, seperti dikatakan Simamora (1995 : h.1) bahwa sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas organisasi, kedua sumber daya manusia juga merupakan pengeluaran pokok organisasi dalam menjalankan bisnis. Alasan lain sumber daya manusia merupakan sumber daya paling penting dalam oragnisasi.

Simamora menyimpulkan bahwa sumber daya mausia membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja. Jadi manusia sebagai titik sentral yang sekaligus sugyek dan obyek dalam organisasi, sedangkan organisasi adalah untuk memenuhi dan mencapai tujuan manusia serta melayani manusia. Oleh karena itu, didalam proses pencapaian tujuan organisasi terjadi pengaruh timbal balik antara manusia, kerjasma, tujuan, peralatan dan struktur organisasi.

Hal ini diperjelas pula dalam pendapat Cardosa (1995 : h.1) yang menyatakan bahwa :

“sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam oraganisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktifitas. Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bias dikelompokkan atas dua macam, yaitu : sumber daya manusia (human resource), dan sumber daya non-manusia (non-human recourse)”.

Dari kesuruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi public maupun swasta sumber daya manusia yang paling penting dan sangat menentukan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya

sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karsa. Satu – satunya sumber daya yang memiliki ratio, rasa dan karsa. Semua potensi sumber daya tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud sumber daya manusia adalah semua usaha manusia yang produktif yang dicerminkan dari kualitas usahanya guna menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

2.2.2 Aparatur Daerah

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya pegawai negeri karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hokum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsure aparatur yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok kepegawaian.

Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan sebaik – baiknya dan dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembanguna perlu ditingkatkan mutu kemampuan dan kesejahteraan manusianya, organisasi dan tata kerja termasuk koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

Perkataan aparatur bersumber dari kata aparat (arti etimologis) yang berarti kelengkapan, alat (peralatan) atau sarana yang dibutuhkan untuk keperluan atau tujuan tertentu apabila ditambah dengan suku kata

“ur” maka kan menjadi kata apartur yang mempunyai arti Negara, alat – alat Negara (pegawai – pegaai dan sebagainya)

Apartur pemerintah daerah adalah keseluruhan pegawai karyawan dan atau pekerja serta lembaga atau pejabat Negara atau pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat didaerah. Menurut Poerwadarminta (1984 : h.53) istilah aparatur dapat diartikan sebagai alat – alat Negara, pegawai – pegawai Negara dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Soeryaningrat (1980 : h.48) Apartur Negara adalah perangkat atau organ Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat Negara yaitu pemerintah.

Menurut Handayani (1992 : h.154) bahwa definisi Aparatur Pemerintah adalah orang – orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan pemerintah (Badan Eksekutif) yang Meliputi :

1. Pejabat Negara yang berstatus dalam bidang pemerintahan (eksekutif) yaitu :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Menteri – Menteri
 - c. Gubernur
 - d. Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh didalam Republik Indonesia maupun diluar Indonesia
2. ABRI yang bertugas dibidang keamanan dan ketertiban
3. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
4. Pegawai Negeri yang bertugas pada perangkat pemerintah desa/kelurahan
5. Aparatur perekonomian Negara yaitu :
 - a. Bank – Baank milik Negara dan daerah yang memberikan pelayanan tas jasa – jasa perbankan
 - b. BUMN dan daerah yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat

Dilain pihak pengertian dari pemerintah daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, meyebutkan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dengan melihat beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Aparatur Daerah adalah semua pegawai pemerintah daerah yang berada di bawah Bupati atau Walikota, serta dikhususkan pada pegawai eksekutif (bukan anggota DPR), serta pegawai yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah misalnya pegawai dinas daerah dan pegawai sekretariat daerah pada kantor kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.2.3 Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Mengingat betapa besarnya peranan manusia di dalam auatu organisasi, maka tentunya perhatian dan pembinaan terhadap manusia sebagai unsure pelaksana serta pengemban misi organisasi sangatlah penting artinya. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah pengembangan pegawai.

Menurut Pandoyo (1986 : h.77) pengertian pengembangan pegawai adalah usaha – usaha untuk meningkatkan ketrampilan maupun pengetahuan bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien.

Pentingnya sumber daya manusia karena merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting bagi suatu organisasi oleh sebab itu harus mendapatkan perhatian yang serius agar dapat digunakan untuk melakukan investasi. Perhatian terhadap sumber daya didalam suatu organisasi adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia.

Sedangkan Moenir (1983 : h.160) berpendapat bahwa pengembangan pegawai adalah suatu usaha yang ditujukan untuk memajukan pegawai baik dari segi karier, pengetahuan maupun kemampuan.

Menurut

Siagian (1999 : h.198) alasan utama melakukan pengembangan sumber daya manusia adalah :

1. Pengetahuan karyawan yang perlu pemutakhiran. Kadaluarasa pengetahuan dan ketrampilan pegawai terjadi apabila pengetahuan dan ketrampilan tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Dikalangan luas diakui bahwa salah satu cirri dunia dewasa ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung dengan pesat. Ketidaktanggapan terhadap perkembangan yang sangat pesat tersebut berakibat pada ketertinggalan seseorang dalam pengetahuan dan ketrampilannya. Meskipun ketertinggalan tersebut seiring lebih terasa pada pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional, sesungguhnya ketertinggalan pada tingkat manajerialpun sering terjadi pula.
2. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi juga karena pergeseran nilai – nilai social budaya. Di bidang teknologi computer, misalnya telah diketahui bahwa karena perkembangan teknologi computer sedemikian pesat, “umur” satu generasi computer sangat singkat berarti suatu perusahaan harus mampu tidak hanya menampung akibat temuan – temuan baru di bidang teknologi computer akan tetapi justru menjadi pelopor perubahan dimaksud. Apabila tidak, perusahaan yang bersangkutan tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan – perusahaan computer lainnya, baik dalam arti kecanggihan, mutu, kemampuan kerja dan harga produknya. Agar tetap mampu bersaing, semua pegawai, manajerial, fungsional, teknis dan operasional mutlak perlu memahami perubahan yang terjadi serta mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan

seperti misalnya yang menyangkut pola kerja, cara berfikir, cara bertindak, pola perilaku dan dalam hal kemampuan.

3. Persamaan hak memperoleh pekerjaan. Tidak sedikit masyarakat yang menganut nilai – nilai diskriminatif pada warganya, termasuk dalam hal memperoleh pekerjaan. Artinya masih ada masyarakat dimana terdapat perbedaan hak dalam memperoleh pekerjaan, misalnya antara pria dan wanita, antara golongan minoritas dan mayoritas atau criteria lain. Jika ada organisasi yang seara resmi menganut kebijaksanaan tersebut, tentu hal demikian tidak dibenarkan. Bagian yang mengelola sumber daya manusia harus peka terhadap situasi demikian. Kepekaan tersebut harus menjamin tidak seorangpun dalam organisasi yang mengalami perlakuan yang sifatnya diskriminatif apapun alasan dan kriterianya karna semua anggota organisasi dan warga Negara mempunyai hak yang sama memperoleh pekerjaan. Juga hak memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan dalam rangka usaha meniti karier.
4. Kemungkinan perpindahan pegawai merupakan kenyataan dalam kehidupan organisasional bahwa mobilitas para pegawai selalu terjadi, baik pada tingkat manajerial, professional bahkan juga pada tingkat teknis operasional. Berarti selalu ada pegawai yang berhenti kerja pada suatu organisasi atau pindah ke organisasi lain, apapun yang menjadi alasan yang menjadi penyebab terjadinya perpindahan tersebut.

Dengan melihat beberapa pengertian diatas maka jelaslah bahwa pengertian dari pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah adalah suatu usaha yang digunakan untuk meningkatkan dan memajukan ketrampilan maupun pengetahuan, baik dari segi karier maupun kemampuan dari aparatur pemerintah daerah.

Dalam menghadapi era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan pegawainya, sehingga diperlukan suatu program pengembangan pegawainya. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu kerja aparatur pemerintah yang selam ini sangat tampak jika mutu aparatur pemerintah masih memerlukan perbaikan.

2.2.4 Evaluasi Kinerja Sumber Daya Aparatur

Evaluasi kinerja atau penilaian kinerja Menurut Nawawi (2003: h.395) Pengertian penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bersifat komprehensif meliputi :

- a. Penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur atau menilai, dan mengelola pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai.
- b. Penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh kepada kesuksesan organisasi non profit dalam mencapai tujuannya.
- c. Penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai untuk menetapkan seorang pegawai sukses atau gagal dalam melaksanakan pekerjaannya dengan mempergunakan standar pekerjaan tolok ukurnya.

Penilaian kinerja bukan merupakan kegiatan kontrol atau pengawasan dan bukan pula mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman (Amstrong, 2004, h.194). Kegiatan penilaian kinerja difokuskan pada usaha mengungkapkan kekurangan dalam bekerja untuk diperbaiki dan kelebihan bekerja untuk dikembangkan, agar setiap pegawai mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kontribusinya dalam melaksanakan pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi non profit yang memperkerjakannya. Untuk itu aspek-aspek yang dinilai harus sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan, sebagaimana terdapat di dalam analisis pekerjaan berupa deskripsi pekerjaan.

Tolak ukur penilaian kinerja merupakan tolok ukur kinerja yang mendorong organisasi mencapai tujuan. Syarat-syarat penilaian dan indikator penilaian kinerja pendekatannya sama dan dapat diputarbalikkan penggunaannya. Beberapa organisasi menggunakan penilaian kinerja untuk hasil yang bersifat kuantitatif dan indikator kinerja untuk keadaan yang bersifat kualitatif.

Proses penilaian pelaksanaan pekerjaan sangat diperlukan tolok ukur sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. Tolok ukur itu disebut standar pekerjaan yang harus dibuat jika hasil analisis pekerjaan sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan, karena sebagian besar atau seluruh tugas-tugas dan cara melaksanakannya sudah mengalami perubahan atau perkembangan, sebagai wujud dari dinamika

pekerjaan (Nawawi, 2003:h.402). Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka pengertian standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang dijadikan tolok ukur atau pembanding pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pengertian lainnya adalah harapan organisasi pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Menurut Alewine (2002:h.224-229). Standar kinerja dapat dibuat dari uraian jabatan untuk mengaitkan defenisi jabatan statis ke kinerja kerja dinamis. Standar kinerja juga dibuat untuk setiap individu dengan berpedoman pada uraian jabatannya. Setiap pegawai mengusulkan sasarannya-sasarannya sendiri kepada pimpinan secara tertulis, bila keduanya menyepakati setiap sasaran, kemudian dapat dibuat pernyataan sasaran secara tertulis. Standar kinerja dianggap memuaskan bila pernyataannya menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab pegawai, memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan, dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif bagaimana hasil-hasil kinerjanya akan diukur.

Standar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang biasa digunakan adalah metode *Graphic Rating Scale* (GRS). Dalam model GRS, Penilai (*rater*) mencantumkan daftar perilaku kerja (*traits*) dengan sebuah kisaran penilaian untuk setiap perilaku tersebut yang biasanya menggunakan *Likert Scale* (amat bagus, bagus, cukup, sedang, dan kurang). Agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang *valid* dan *reliable* maka sistem penilaian kinerja harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Keadilan

Penilaian kinerja harus mencerminkan keadilan bagi semua pegawai yang dinilai kinerjanya, pegawai yang kinerjanya bagus harus diberi nilai yang bagus demikian pula sebaliknya.

2. Transparan

Penilaian harus dilaksanakan secara terbuka artinya setiap pegawai yang kinerjanya dinilai berhak atas informasi mengenai nilainya, alasan pemberian nilai tersebut dll. Penerapan prinsip transparansi ini dapat meminimalisir penyalahgunaan informasi.

3. Independen

Penilaian kinerja tahun tertentu harus terlepas dari pengaruh hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya.

4. Pemberdayaan

Penilaian kinerja harus dapat memberdayakan dan memotivasi pegawai dimana pegawai yang kinerjanya tinggi diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong pegawai lain yang kinerjanya masih rendah agar mampu meningkatkan kinerjanya.

5. Non diskriminasi

Proses pengukuran kinerja harus tidak membedakan pegawai menurut suku, bangsa, agama, asal daerah dan lain-lain.

6. Semangat Berkompetesi

Proses pengukuran kinerja harus mampu mendorong kompetisi diantara para pegawai untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya secara sehat.

Penilaian kinerja atau prestasi kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dilihat dari:

- a. Kuantitasnya yaitu jumlah dan formasi pegawai
- b. Kualitasnya yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kedisiplinan pegawai

Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu proses penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaannya di tempat kerja untuk memperoleh kemajuan secara sistematis (Moekijat, 1991:h.59).

2.3 Sistem Informasi

2.3.1 Definisi Sistem Informasi

Semua organisasi atau perusahaan pasti memiliki system informasi. Organisasi atau perusahaan membutuhkan suatu system yang dapat mengolah data yang sedang mengalir di dalam dan diluar lingkungan organisasi. System itu harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menemukan validitas data yang berasal dari berbagai sumber.

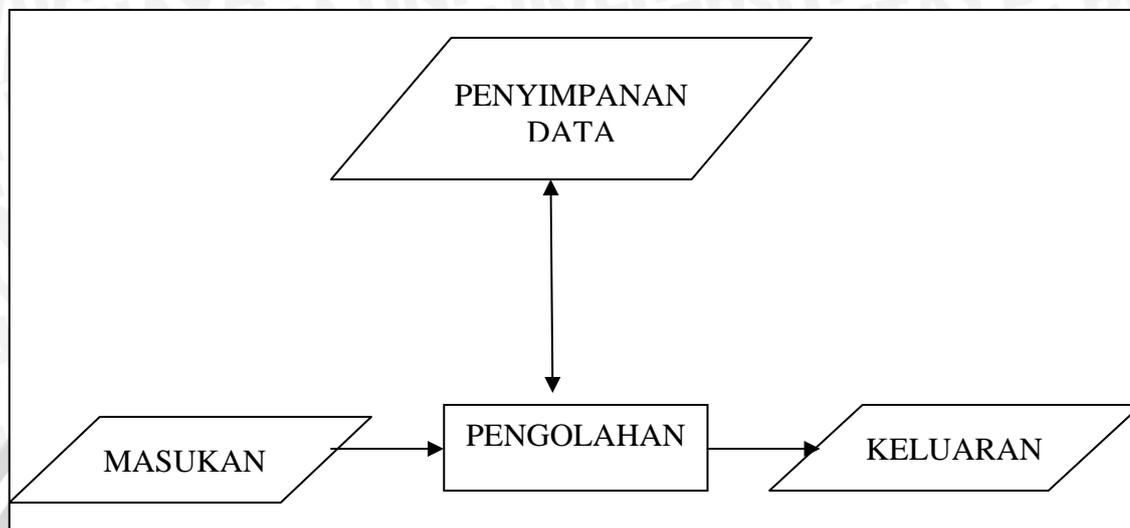
Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis mendefinisikan system informasi yang dikutip Rahardjo (2002:h.11) bahwa system informasi adalah suatu system di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung operasi, bersifat manajerial dan merupakan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sedangkan Indrajid (2003:h.3) mengungkapkan bahwa system informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi.

Selanjutnya Indrajid (2000) mengungkapkan adanya hubungan yang sangat erat antara system informasi dan teknologi informasi.

Ditinjau dari segi pengertian, system informasi dapat dianalogikan sebagai sebuah permintaan (*demand*) dari masyarakat industry, ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah (menembus ruang dan waktu). Sementara disisi lain, teknologi informasi merupakan jawaban dari dunia industry (*supply*) terhadap permintaan tersebut dalam bentuk penciptaan produk-produk berbau teknologi perangkat keras dan perangkat lunak (Indrajit,2000:h.1)

System informasi menerima masukan data dan instruksi, kemudian mengolah data tersebut sesuai instruksi, mengeluarkan hasilnya (Davis, 2002:h.91). fungsi system informasi dalam mengolah informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam kurub waktu sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah penyimpanan data file ke dalam model system informasi, namun juga menyimpan data untuk digunakan pada masa mendatang. Gordon B. Davis menggambarkan model system informasi yang telah ditambahkan penyimpanan data seperti pada gambar 2 berikut ini :

Gambar 1

Model Dasar Sistem Informasi Ditambah Penyimpanan Data

Sumber: Gordon B. Davis *Kerangka Dasar Sistem Informasi Volume 1* (2002:h.91)

2.3.2 Sistem Informasi Berbasis Komputer

Kesadaran akan pentingnya penggunaan system informasi dengan pendekatan teknologi mutakhir yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi computer telah melahirkan kebutuhan akan system informasi berbasis computer atau *Computer Based Information Sistem* (CBIS) yang bukan hal baru lagi pada saat ini, computer merupakan bentuk teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi sehingga computer dipandang sebagai salah satu produk dalam domain teknologi informasi (Indrajit, 2002:h.2).

System informasi berbasis computer adalah suatu system informasi yang menempatkan perkakas pengolahan data computer dalam kedudukan yang penting. Parker dalam Kumorotomo dan Subandono (2004:h.16) mengungkapkan bahwa suatu system informasi yang berbasis computer (CBIS) terdiri dari manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada

pihak-pihak dalam maupun luar organisasi yang berkompeten. Berdasarkan definisi tersebut, maka unsure-unsur system informasi yang berbasis computer terdiri dari:

1. Manusia

System informasi yang berbasis computer harus memperhatikan unsure manusia agar system yang diciptakan dapat bermanfaat. Dalam hal ini, unsure manusia adalah para staff pengelola computer yang professional dan para pemakai (*end user*).

2. Perangkat Keras (*hardware*)

Istilah perangkat keras ini merujuk pada perkakas mesin. Oleh karena itu, perangkat keras terdiri dari computer itu sendiri (*Central Processing Unit*) beserta semua perangkat pendukungnya, termasuk *input devices*, *memory devices*, *output devices*, dan *communication devices*.

3. Perangkat Lunak (*software*)

Istilah ini merujuk pada program-program computer beserta petunjuk (*manual*) pendukungnya. Program computer itu sendiri adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras system informasi berbasis computer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia.

4. Data

Adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data biasanya disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin sehingga setiap saat computer dapat mengolahnya.

5. Prosedur

Adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi system computer, misalnya peraturan bahwa setiap permintaan pengeluaran anggaran di suatu organisasi harus tercatat di dalam basis data komputer.

2.3.3 Internet

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dewasa ini yang diaplikasikan untuk beraneka ragam kepentingan adalah internet yang merupakan jaringan computer global. Internet sangat bermanfaat karena mempermudah para penggunanya untuk berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak dan mempermudah perolehan informasi yang dibutuhkan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta dalam tempo yang singkat. Bagi instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan internet terutama yang dimaksudkan untuk mendukung layanan public sering disebut *electronic government* (Setiyadi 2003).

Lani (1996) menganalogikan internet sebagai forum global pertama dan perpustakaan global pertama dimana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala waktu tanpa memperhatikan penampilan, warna kulit, agama, tempat tinggal ataupun status social penggunanya. Internet bukan hanya sebagai jaringan computer. Jaringan computer hanyalah media pengolahan informasi. Fungsi internet terletak pada informasi itu sendiri, bukan pada jaringan computer. Selengkapnya Lani (1996) menyatakan :

“namun demikian, membayangkan internet sebagai sekedar jaringan computer adalah tidak tepat. Jaringan computer hanyalah medium yang membawa informasi. Dayaguna internet terletak pada informasi itu sendiri, bukan pada jaringan computer. Sementara penulis membahas internet, sebaiknya memperhatikan internet sebagai sumber daya informasi, bukan sebagai jaringan computer. Selain itu, anda sebaiknya memperhatikan internet sebagai sumber daya informasi yang berorientasi ke manusia. Internet member kesempatan pada pemakai di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan memakai bersama sumber daya informasi”.

Selanjutnya, Lani (1996:h.9) menyebutkan ada empat pelayanan penting yang dapat disediakan internet, yaitu:

1. Pelayanan *Mail* (surat)

Adalah pelayanan untuk mengirim dan menerima pesan-pesan. Setiap pesan dikirim dari satu system ke system-sistem yang lain menuju tujuan akhir.

2. Pelayanan Telnet

Adalah pelayanan yang member kesempatan kepada pengguna internet untuk menghubungi system *remote* atau system yang terletak di tempat yang jauh. Sebagai contoh, pengguna intrnet dapat menggunakan telnet untuk menghubungi sebuah *host* (computer yang sedang *online*)

3. Pelayanan *File Transfer Protocol* (FTP)

Adalah pelayanan yang member kesempatan pengguna internet untuk mentransfer file dari satu system ke system yang lain. Dalam internet, *user* (pengguna internet) dapat mentransfer file dari sebuah *host remote* ke *host local* ataupun sebaliknya.

4. Pelayanan *Client/Server*

Pelayanan ini menggunakan program *client* untuk meminta dukungan program server dalam rangka memenuhi keinginan dari *user*.

Dalam internet dikenal istilah *website*, *web page*, *home page*, *web* dan *browser*. Raharjo (2002) mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. *Website* (situs *web*) merupakan alamat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi berdasarkan topic tertentu.
2. *Web-page* (halaman *web*) merupakan halaman khusus dari situs *web* tertentu yang tersimpan dalam bentuk *file*. Dalam *web-page* tersimpan berbagai informasi dan *link* yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lainnya baik dalam bentuk *page* yang sma ataupun *web-page* lain pada *website* yang sama.
3. *Home page* merupakan halaman pertama atau sampul dari suatu *website* yang biasanya berisi tentang apa dan siapa dari perusahaan atau instansi pemilik *website* tersebut. Jadi pada dasarnya *home page* merupakan sarana dasar memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan *website* dari suatu organisasi atau pribadi.
4. *Web* adalah fasilitas *hypertext* untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi dan data multimedia laninnya yang diantara data tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya.
5. *Browser* merupakan suatu program yang dirancang untuk mengambil informasi-informasi dari suatu *server computer* pada jaringan internet. Jadi untuk mengakses *web* diperlukan program *web browser* (Raharjo, 2002:h.18)

Dengan adanya pelayanan yang tersedia dalam internet memungkinkan adanya integritas data dan informasi di seluruh dunia sehingga informasi yang semula merupakan sesuatu yang mahal dan sulit diperoleh dapat diminimalkan. Siapapun dan dimanapun individu ataupun organisasi dapat mengolah, mengirimkan dan mempublikasikan informasi yang dimiliki secara efektif dan efisien, begitupun juga mereka yang membutuhkan informasi dapat memperolehnya dengan cepat dan efisien.

2.4 Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan

2.4.1 Teknologi Informasi

Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi computer yang dipadukan dengan teknologi komunikasi. Basuki (1998 : h.15) mendefinisikan teknologi informasi sebagai penggunaan teknologi untuk pengadaan, penyimpanan, temu balik, analisis, dan komunikasi informasi dalam bentuk data numeric, teks atau tekstual, citra atau suara, terutama dengan menggunakan mikroprosesor beserta berbagai aspeknya. Dalam teknologi informasi terdapat dua komponen utama yaitu computer dan telekomunikasi.

Pendapat diatas searah dengan definisi yang terdapat dalam Longman Dictionary yang dikutip oleh Priyanto dan Sanusi (2001 : h.2), yang mengartikan teknologi informasi (*information technology*) as the *science and practice of collecting, storing, using, and sending out of information by means of computer system and telecommunications* (suatu ilmu dan seni dalam mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan mendistribusikan informasi dengan menggunakan system computer dan telekomunikasi). Dari pengertian diatas bahwa teknologi informasi akan selalu terkait dengan pengolahan data menjadi informasi dengan bantuan alat komunikasi, diantaranya yang paling vital adalah computer.

Beranjak dari pengertian ini, Alter (1999) dalam Priyanto dan Sanusi (2001 : h.2) mendefinisikan pengertian teknologi informasi sebagai perangkat lunak maupun keras yang digunakan dalam system informasi.

Pendapat tersebut merupakan pengertian semu dari teknologi informasi. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari turban (1999) yang dikutip dalam Sanusi dan Priyanto (2001 : h.2), yang mengemukakan bahwa teknologi informasi merupakan bagian “teknis” dari system informasi yang terdiri dari *hardware*, *software*, *database*, lain – lain. Dengan demikian teknologi informasi merupakan salah satu sub system dari sisitem informasi.

Dari beberapa penjelasan di atas, Priyanto dan Sanusi (2001 : h.3) menarik beberapa benang merah dari teknologi informasi, yaitu :

1. Beberapa kumpulan system informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi untuk diterima, didistribusikan, dan disimpan (*storage and distributed*).
2. Alat atau media yang secara efektif dapat digunakan untuk mensosialisasikan, megkomunikasikan ide, konsep, jasa, dan produk maupun visi yang berbasiskan pada teknologi computer maupun teknologi komunikasi lainnya

2.4.2 Peranan Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan

Teknologi informasi dalam wacana administrasi public baru (*new public administration*) ditempatkan sebagai variable utama dalam mendukung terlaksananya administrasi public yang efisien, efektif, berkeadilan, dan tentunya akuntabel. Kehadiran teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir telah membuktikan bahwa dia mampu memberikan “sesuatu” yang semula sangat sulit dipenuhi oleh administrasi public tradisional yakni dalam hal kecepatan, keakuratan, dan keobjektifannya. Dengan kata lain, teknologi informasi telah diyakini menjadi *enabler factor* untuk mewujudkan suatu administrasi yang bebas dari pengaruh hubungan personal.

Sejak tahun 1980-an, peran pemerintah mengalami suatu proses perubahan transisional dari karakteristik pengolahan public yang berbasis pada kekuasaan tanpa adanya suatu pertanggungjawaban kinerja kearah pengelolaan public yang berbasis pada kekuasaan pengguna jasa dari peran sebagai penyelenggara (*acting*) kearah pengarah (*regulating*) dalam

rangka pemberdayaan masyarakat, dari kultur yang tertutup menuju ke sebuah tatanan organisasi yang terbuka, desentralistik, dan demokratis, serta dari suatu pemerintahan yang *bad governance* ke arah suatu pemerintahan yang *clean dan good governance*

Organisasi public mengandalkan pada basis *networking*, baik terhadap organisasi public maupun kepada masyarakat. Birokrasi yang seringkali dikonotasikan sebagai “kotak hitam” (*black box* yang terpisah dari kepentingan public harus diubah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka sejak dasawarsa terakhir ini dalam wawancara administrasi public telah menghasilkan beberapa model dan teknologi administrasi yang berbasis pada *high tech information*. Salah satu wujudnya adalah *electronic Government*.

Berangkat dari pemahaman diatas Priyanto dan Sanusi (2001 : h.8) mengemukakan beberapa peran yang dapat dimainkan teknologi informasi dalam kepentingan organisasi public, diantaranya :

1. Mengurangi aspek – aspek bahaya moral dalam transaksi public
2. Teknologi informasi membawa adanya keterbukaan (*transparency*) dalam pemerintahan
3. meningkatkan objektivitas dalam pelayanan public
4. mengurangi aspek impersonal dalam tubuh pemerintahan dalam memberikan pelayanan public
5. meningkatkan efisiensi dalam organisasi
6. mengurangi biaya administrasi dalam pemberian pelayanan
7. factor pendorong pertumbuhan ekonomi

2.5 *Electronic Government*

2.5.1 Definisi *Electronic Government*

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dewasa ini telah memungkinkan berkembangnya *electronic government*. Sebagai sebuah konsep, *e-government* pada awalnya berkembang di Negara Inggris. Pada saat itu di Inggris terjadi suatu perkawinan antara pemerintah dengan teknologi informasi yang kemudian melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan *Electronic Service Delivery* (ESD). ESD adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk dapat menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat melalui media elektronik dan digital. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal lahirnya *e-government*.

Dilihat dari sejarahnya, konsep *e-government* berkembang karena adanya tiga pemicu utama yaitu :

1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap Negara apabila tidak ingin dikucilkan dari pergaulan dunia. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus melakukan reposisi terhadap peranannya, dari yang bersifat internal dan focus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan focus terhadap bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.
2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan informasi dapat disebarluaskan dalam waktu yang sangat singkat sehingga individu di berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapa pun yang dikehendaki tanpa mengenal batasan Negara, waktu, dan lain – lain.
- 3 Meningkatkan kinerja sector swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menyebabkan terbentuknya suatu standart pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi pula (Indrajit 2002 : h.7)

ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan kecanggihan dari berbagai teknologi yang ada, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya konsep *e-government* di lingkungan pemerintahan.

Pemahaman mengenai konsep *e-government* di suatu Negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal dari Negara yang bersangkutan. Walaupun sebagai sebuah konsep *e-government* memiliki prinsip – prinsip dasar yang universal, namun karena setiap Negara memiliki scenario implementasi/penerapan yang berbeda – beda, maka definisi dari ruang lingkup *e-government* pun menjadi beraneka ragam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Federal Amerika Serikat mencoba memberikan definisi *e-government* secara ringkas, jelas, dan padat yaitu :

“e-government refers to the delivery of government information and services online through the internet or other digital means” (e-government mengacu pada penyampaian informasi dan pelayanan pemerintah secara *online* melalui internet atau media digital lainnya)

Sementara itu, Pemerintah Selandia Baru sebagai salah satu Negara yang sukses menerapkan *e-government*, seperti yang dikutip oleh (Indrajit, 2002:h.4), melihat *e-government* sebagai sebuah fenomena sebagai berikut :

The use of modern ICT in the modernization of our administration, which comprise the following classes of action (penggunaan ICT modern dalam memodernisasi sistem administrasi terdiri dari beberapa kegiatan berikut ini:

1. *Computerization designed to enhance operational efficiency within individual departments and agencies* (Komputerisasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pekerja antara departemen dan badan) ;
2. *computerization of service to citizens and firms, often implying integration among the services of different departments and agencies* (komputerisasi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha meliputi integrasi pelayanan dari beberapa departemen dan badan yang berbeda) ;

3. *Provision of ICT access to final users of government services and information* (penyediaan akses ICT kepada para pengguna layanan dan informasi pemerintah).

Dari beberapa definisi mengenai *e-government* seperti telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*), yang melibatkan pengguna teknologi informasi dan telekomunikasi (terutama internet) dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

Jadi dari beberapa pendapat tentang definisi *electronic government* diatas dapat disimpulkan bahwa *electronic government* merupakan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkaitan.

2.5.2 Tipe Relasi *Electronic Government*

Meneurut Indrajit (2002 : h.41) dalam konsep *e-Government* dikenal ada empat jenis tipe relasi, yaitu :

1. *Government to Citizens* (G2C)

Tipe ini merupakan jenis aplikasi *e-Government* yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portfolio teknologi informasi dengan tujuan utama agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan

2. *Government to Business* (G2B)

Salah satu tugas utama dari pemerintah adalah menciptakan suatu lingkungan bisnis yang bersifat kondusif agar roda perekonomian Negara dapat berjalan sebagai mana mestinya. Disisi lain, entity bisnis semacam perusahaan swasta juga membutuhkan banyak sekali data dan informasi

yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan suatu relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis.

3. *Government to Government (G2G)*

Aplikasi G-toG diciptakan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, interaksi antara kedua instansi pemerintah tidak hanya terbatas pada hal – hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar pemerintah maupun antar Negara

4. *Government to Employess (G2E)*

Keberadaan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu, aplikasi *e-Government* juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang bekerja di sejumlah instansi pemerintah.

Dengan melihat adanya berbagai macam tipe relasi dalam *e-Government* seperti telah disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa keberadaan *e-Government* tidak hanya dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan para *stakeholders* lainnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan di suatu Negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan Negara itu sendiri.

2.5.3 Jenis – jenis Pelayanan Pada Electronic Government

Dalam implementasinya, ada beragam tipe pelayanan yang ditawarkan *e-government*. Salah satu cara untuk mengategorikan jenis – jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama, yaitu :

1. Aspek Kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-government* yang ingin dibangun dan diterapkan; dan

2. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal – hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis – jenis proyek *e-government* menurut Indrajit (2002 : h.29) dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :

1. *Publish*

Jenis ini merupakan implementasi *e-governmen* yang termudah karena selain proyeknya berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas *Publish* ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimanan pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak – pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

2. *Interact*

Berbeda dengan kelas *Publish* yang sifatnya pasif, pada kelas *Interact* telah terjadi kemunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang dipergunakan dalam kelas ini. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas *Publish*, *user* hanya dapat mengikuti *link* saja). Yang kedua adalah pemerintah meyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*, dan sebagainya) maupun tidak langsung (melalui *e-mail*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan sebagainya).

3. *Transact*

Pada kelas *transact* yang terjadi adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan pemindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua kelas sebelumnya karena menuntut adanya system keamanan yang baik agar pemindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak – hak privasi berbagai pihak yang dalam transaksi terlindungi dengan baik.

2.5.4 Kriteria Situs Web Pemerintah Daerah

Meskipun dasarnya konsep *e-government* tidak hanya sekedar pembuatan sebuah situs *web*, akan tetapi bagi pemerintah daerah keberadaan situs web sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena melalui situs web resminya, pemerintah dapat menginformasikan hal – hal yang dianggap penting bagi masyarakat dan memperkenalkan potensi daerahnya kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, di dalam membangun situs web ada sejumlah criteria yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh kementerian Komunikasi dan Informasi, criteria yang dimaksud antara lain:

1. Fungsi, Aksesibilitas, dan Kegunaan

Situs web pemerintah daerah sebaiknya berfokus pada keperluan pengguna, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pengguna. Selain itu, situs web pemerintah daerah harus secara terus menerus berevolusi untuk memenuhi permintaan pengguna dan mencapai aksesibilita dan kegunaan universal. Desain situs web pemerintah daerah sebaiknya professional, menarik, dan berguna sesuai dengan kebutuhan para pengguna yang beragam.

2. Bekerjasama

Situs web pemerintah daerah harus saling bekerja sama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah.

3. Isi yang Efektif

Pengguna memiliki hak untuk mengharapkan isi dari suatu situs web pemerintah daerah adalah data terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selalu diketengahkan. Pengelola situs web pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penyediaan beberapa isi dalam situs web sehingga dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dari pengguna yang berbeda.

4. Komunikasi Dua Arah

Situs web pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menghubungkan mereka dengan pihak-pihak yang berwenang, menjelaskan pandangan/pendapat mereka, atau membuat daftar pertanyaan mereka sendiri.

5. Evaluasi Kesuksesan

Situs web pemerintah daerah harus memiliki system untuk mengevaluasi kesuksesan dan menentukan apakah situs web-nya memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebutuhan pengguna akan menentukan arah perkembangan situs sehingga jika diperlukan desain situs web juga harus diperbaiki.

6. Kemudahan Menemukan Situs

Pada saat ini ada berjuta-juta situs web. Oleh karena itu pengelola perlu mempromosikan dan mendaftarkan situs web pemerintah daerah melalui cara lain seperti pemberitahuan lewat pers, humas, brosur, dan lain – lain.

7. Pelayanan yang Diatur dengan Baik

Suatu situs web pemerintah daerah akan terselenggara dengan baik jika menggunakan sumber – sumber yang terpercaya, strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna serta strategi pengembangan masa depannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Di dalam ilmu-ilmu sosial khususnya studi ilmu administrasi publik, objek pengamatan dan penelitian yang merupakan pangkal dari pengetahuan ilmiah adalah gejala-gejala masyarakat yang lebih khusus, terdiri dari kejadian-kejadian yang konkret. Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian yang mempunyai fungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan sasaran serta untuk mengadakan pendekatan terhadap objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan kondisi riil dari pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Malang, khususnya di dalam Bagian Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang. Tujuan dari peneliti adalah untuk memantapkan teori dan pengetahuan mengenai teknologi informasi dalam memberikan informasi tentang Kabupaten Malang. Berdasarkan tujuan tersebut sulit dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, akan tetapi penelitian dengan metode kualitatif.

Beberapa alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif daripada metode kuantitatif, seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2007,:h.31-37), diantaranya:

1. Penelitian kuantitatif bertujuan membuat deskripsi objektif tentang fenomena yang sifatnya terbatas dan dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Sedangkan penelitian ini mencoba mengembangkan pengertian tentang suatu proses dan individu dengan memperhatikan konteks yang relevan.
2. Penelitian kuantitatif menjelaskan penyebab fenomena melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal, dengan metode terstruktur formal, ditentukan terlebih dahulu, tidak luwes dan dijabarkan secara rinci terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Sedangkan tujuan penelitian

ini lebih pada upaya memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman yang sifatnya mendalam, sehingga lebih sesuai dengan pendekatan kualitatif.

3. Strategi yang digunakan pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan dokumen, wawancara, serta mencatat data secara intensif. Atau dengan kata lain, biasanya metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Lain halnya dengan penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan datanya lebih bersifat numerik, kode dikuantifikasikan, statistikal, dihitung dan diadakan pengukuran.

4. Dalam melakukan interpretasi data, kesimpulan dan generalisasi dalam penelitian kuantitatif diformulasikan pada akhir penelitian, dinyatakan dengan derajat kepercayaan tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini adalah tentatif, di-*review* atas dasar sesuatu yang masih berlangsung, hal ini tertuang dalam penelitian kualitatif.

Dari beberapa alasan diatas, peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Pengolahan teknologi informasi dan komunikasi pada Bagian Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan metode kualitatif. Pada prinsipnya penggunaan metode kualitatif ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

1. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden
3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2007, h.9),

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Bogdan&Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai "Prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2007, h.4)

3.2 Fokus Penelitian

Focus penelitian adalah hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian. Penerapan batasan berdasarkan focus penelitian yang timbul dalam masalah penelitian sangatlah penting. Dengan adanya focus penelitian, maka akan memberi kemudahan pada peneliti dalam aktivitas pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Moleong (1988 : h.62) focus penelitian dengan sebuah penelitian kualitatif memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membatasi studi atau dengan kata lain focus penelitian dapat membatasi bidang – bidang inklusi eklusi, misalnya jika peneliti membatasi diri dalam upaya menemukan teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi criteria inquiri-ekslusi (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya focus penelitian seseorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data – data yang sedang dikumpulkan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada peran dan kemampuan dari sumber daya aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada Bagian Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk itu focus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Bagian Pengelola Data Elektronik, dilihat dari :
 - a. Pengembangan Situs Resmi di Pemerintahan Kabupaten Malang
 - b. Pengembangan infrastruktur jaringan
2. Peran sumber daya aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kantor Pengolahan Data Elektronik

- a. Peran sumber daya aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - 1). Peran sumber daya aparatur dalam pengolahan data
 - 2). Peran sumber daya aparatur dalam penyediaan layanan informasi untuk bahan kebijakan
 - 3). Penyedia informasi dan data untuk evaluasi program
 - b. Pengembangan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi
 - 1). Pelatihan *hardware* dan *software*
 - 2). Penguasaan teknologi *hardware* dan *software*
3. Evaluasi kinerja sumber daya aparatur dalam pengolahan teknologi informasi dan komunikasi pada Bagian Pengelola Data Elektronik

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap kejadian sebenarnya dari obyek yang akan dilakukan suatu penelitian. Situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari keadaan yang diteliti. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Malang. Lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Bagian Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang yang beralamat di Gedung Sekretariat Daerah Lt3 Bagian Pengelola Data Elektronik Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang Email : <mailto:kpdemlg@kabmalang.go.id>. Secara umum lokasi penelitian dan situs penelitian ini dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian
2. Bagian Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang merupakan kantor pengelola informasi dari pusat maupun dari kantor-kantor dan dinas-dinas di lingkup Kabupaten Malang.
3. Kabupaten Malang mempunyai wilayah yang luas, serta dipisahkan oleh dua kota, maka kebutuhan akan koordinasi yang cepat merupakan kendala. dengan adanya internet antar instansi melalui situs resmi

Kabupaten Malang, kinerja pemerintah dari segi koordinasi dapat terbantu.

3.4 Sumber Data

Menurut Arikunto (2002:h.107), yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang dan dari studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dari sumbernya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diupayakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti atau data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak-pihak tertentu yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang ada pada Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang, yaitu mengenai gambaran umum Kantor Pengolahan Data Elektronik, struktur organisasi, dan artikel-artikel di internet serta data-data lain yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian

c. Internet

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dewasa ini yang diaplikasikan untuk beraneka ragam kepentingan adalah internet yang merupakan jaringan computer global. Internet sangat bermanfaat karena mempermudah para penggunanya untuk memperoleh data terbaru baik ditingkat nasional maupun internasional.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memperoleh data tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Karena setiap peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Esterberg mendivinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen bias berbentuk cerita , biografi, peraturan, kebijakan.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto 2002:h.136). dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri

Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. (Moleong, 2000: 121)

2. Pedoman Wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis besar piha-pihak yang ditanyakan dalam proses wawancara. (Moleong, 2000: 136)

3. Pedoman Observasi

Field notes menurut Bogdan dan Biklen (1982: 74) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. (Moleong, 2000: 153)

4. Studi Dokumentasi

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat berupa alat pendokumentasian, alat tulis-menulis dan foto copy dokumentasi untuk mendapatkan data-data.

3.7 Rancangan Analisis Data

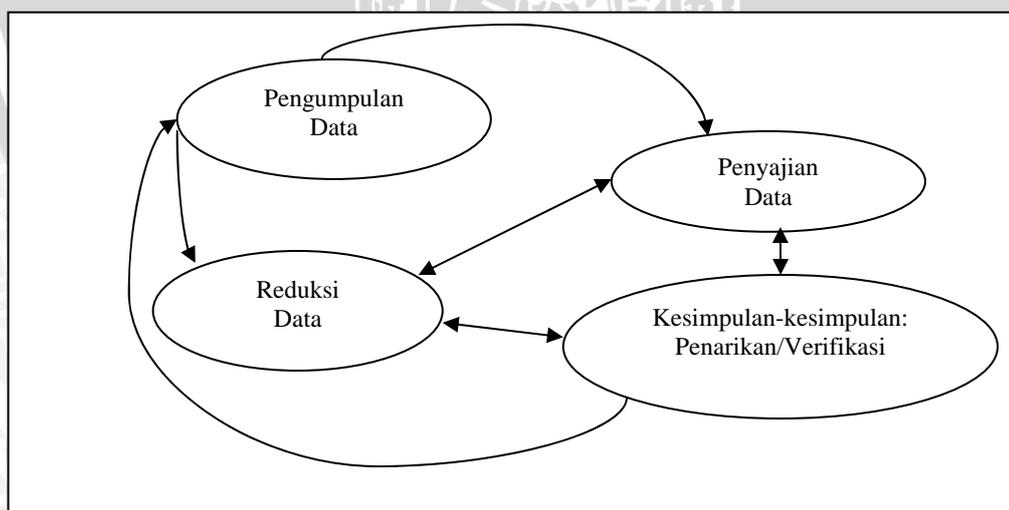
Sebuah analisis data jenis apapun, pada dasarnya melibatkan cara berfikir tertentu yang menunjuk pada pengujian secara sistematis tentang suatu hal guna menemukan bagian-bagiannya hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Singarimbun dan Effendi (1995, h.263) mengartikan analisis data sebagai proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintrepassikan. Setelah data tersebut disajikan dalam bentuk tabel guna kepentingan analisis, maka selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan temuan khusus dilapangan.

Secara umum metode analisis data keseluruhan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang terdiri 3 (tiga) komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 1992, h.20). Selanjutnya analisis yang dilakukan dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen utama tersebut dimana peneliti selalu bergerak diantara kegiatan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Analisis data kualitatif dengan model interaktif digunakan peneliti pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan, proses verifikasi juga dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan, ketika muncul keraguan dalam diri peneliti terhadap data yang diperoleh, maka secara langsung peneliti melakukan verifikasi terhadap informan. Secara sederhana proses tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 2

Bagan Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman, (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi 1992, h.20)



1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles and Huberman, 1992, h.16). Data lapangan diuraikan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Dimaksudkan untuk memudahkan peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi muncul sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti selama menulis, yang menjadi tinjauan ulang atau peninjauan kembali pada catatan lapangan. Peneliti menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus dapat ditarik kesimpulan.

Jadi, analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul-menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles and Huberman, 1992, h.20)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten terluas wilayahnya dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Malang terletak pada ordinat $112^{\circ} 17' 10,9''$ – $112^{\circ} 57' 0,0''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ – $8^{\circ} 25' 35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayahnya adalah ± 3.348 km² atau sama dengan ± 334.800 Ha dan, dengan batas-batas administrative sebagai berikut:

Sebelah Utara Timur : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang.

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar.

Sebelah Barat Utara : Kabupaten Kediri, Jombang, Mojokerto

Sedangkan dibagian tengah Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang dan Kota Batu.

Kabupaten Malang terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 1.00 m diatas permukaan laut menunjukkan keadaan yang berfariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Sesuai dengan letak dan kondisi geografisnya, Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara $18,25^{\circ}$ C – $31,45^{\circ}$ C dan curah hujan rata-rata pertahun 1,852 mm. dengan kondisi tersebut, Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkenunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Malang. Oleh karena itu, dengan adanya internet antar instansi melalui situs resmi Kabupaten Malang, kinerja pemerintah dari segi koordinasi dapat terbantu.

4.1.2 Keadaan Umum

Luas Wilayah : 351.456,99 Ha

Terdiri Dari :

1. Pemukiman/Kawasan Terbangun : 44,234.35 Ha

2. Sawah

Irigasi : 36,279.5 Ha

Non Irigasi : 10,169.88 Ha

3. Pertanian : 100,221.42 Ha

4. Perkebunan

Rakyat : 8,880.34 Ha

Besar : 21,162.61 Ha

5. Hutan

Sejenis : 17,406.93 Ha

Belukar : 10,198.62 Ha

Lebat : 73,408.06 Ha

6. Tanah kosong/padang rumput/alang-alang : 1,042.59 Ha

7. Tanah rusak/tanah tandus/tanah terbuka : 5,431.77 Ha

8. Tambak : 131.55 Ha

9. Danau/rawa/situs : 718.69 Ha

10. Lain-lain : 9,848.32 Ha

Sumber:

Wilayah Administrasi Kecamatan :

1. Kecamatan : 33

2. Kelurahan : 12

3. Desa : 377

4. Desa Persiapan : 1 Sidosari Kecamatan

Sumber Manjing Wetan

- | | |
|------------------------|----------|
| 5. Rukun Warga (RW) | : 3.138 |
| 6. Rukun Tetangga (RT) | : 14.346 |

Penduduk

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Jumlah Penduduk (2005) | : 2.419.822 jiwa |
| Laki-laki | : 1.218.793 jiwa |
| Perempuan | : 1.201.083 jiwa |
| 2. Kepadatan Penduduk | : 689 jiwa/km ² |

4.1.3 Gambaran Umum Bagian Pengelolaan Data Elektronik

Bagian Pengelola Data Elektronik berlokasi di Kantor Pemerintahan Kabupaten Malang yang beralamat di Gedung Sekretariat Daerah Lt3 Bagian Pengelola Data Elektronik Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang Email : <mailto:kpdemlg@kabmalang.go.id>. Kelembagaan organisasi dan tata kerja Bagian Pengelola Data Elektronik, sebelum era otonomi daerah dibentuk berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 1996 dengan berstatus sebagai Kantor Pengolahan Data Elektronik mulai tanggal 01 November 1996. Pengisian formasi personil untuk jabatan baru terealisasi tanggal 13 januari 1999. Sesudah Otonomi Daerah Pengolahan Data Elektronik dibentuk berdasarkan Perda Nomor 29 Tahun 2001, namun setelah keluarnya Keputusan Bupati Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah nama Kantor Pengolahan Data Elektronik berubah menjadi Bagian Pengelola Data Elektronik. Bagian Pengelola Data Elektronik Telah merintis beberapa terobosan dalam penerapan teknologi informasi dalam upaya memajukan Kabupaten Malang. Rencana pengembangan system informasi di Pemerintah Kabupaten Malang merupakan realisasi dari rencana Bagian Pengelola Data Elektronik untuk melakukan penataan terhadap system informasi guna mendukung kebijakan pengembangan system informasi yang ada guna mendukung kebijakan pengembangan system informasi yang terintegrasi serta pengendalian aliran data dan informasi di instansi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Malang. Memberikan informasi yang akurat setiap saat merupakan tantangan bagi

Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Bagian Pengelola Data Elektronik. Dengan menjalin intergrasi antar Badan/Dinas/Kantor/Bagian maka diperoleh masukan yang lebih akurat dan dapat bermanfaat bagi Bupati, Sekretaris Daerah, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah hingga masyarakat luas. Agar informasi yang tersebar di instansi-instansi di Kabupaten Malang dapat diintegrasikan dan dikendalikan dengan baik maka diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa aspek, baik perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) maupun sumber daya manusia.

Lingkup pembangunan dan pengembangan system komputersisasi yang menampung segala aktifitas data, dan sebagai sajian atau bahan informasi sumber data, memerlukan adanya pengolahan yang tersentralisasi. Hal ini penting, agar pada saat yang dibutuhkan, seseorang/pengambil keputusan dapat mengambil suatu kebijakan secara tepat dan akurat.

4.1.4 Visi dan Misi Bagian Pengelolaan Data Elektronik

untuk mencukupi kebutuhan akan perkembangan informasi yang dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan perlu dilakukan upaya penyediaan informasi yang aplikatif dan aspiratif serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain Bagian Pengelolaan Data Elektronik mempunyai visi dan misi yang dijalankan guna menunjang proses penyediaan informasi yang aplikatif dan aspiratif serta dapat dipertanggungjawabkan.

VISI:

Terselenggaranya E-Government dalam mewujudkan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersih, transparan dan berwibawa

MISI:

Meningkatkan kualitas informasi dan pengelolaan data secara elektronik melalui penggunaan Teknologi Informasi, Mewujudkan peran teknologi untuk peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan, dan Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi Managemen (SIM) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menunjang sistem pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.

4.1.5 Dasar Hukum Kebijakan Program Pembangunan dan Pengembangan Bagian Pengelola Data Elektronik

1. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
3. Kepres 50 / 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
4. Kepres 6 / 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
5. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Malang

4.1.6 Tugas Pokok Bagian Pengelola Data Elektronik

Bagian Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan data elektronik dan teknologi informasi
2. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi meliputi infrastruktur, system dan teknologi informasi
3. Melaksanakan pelayanan pengolahan data elektronik
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.7 Fungsi Bagian Pengelola Data Elektronik

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan data elektronik
2. Penyusunan dan analisis data serta penyiapan system aplikasi yang dibutuhkan
3. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran

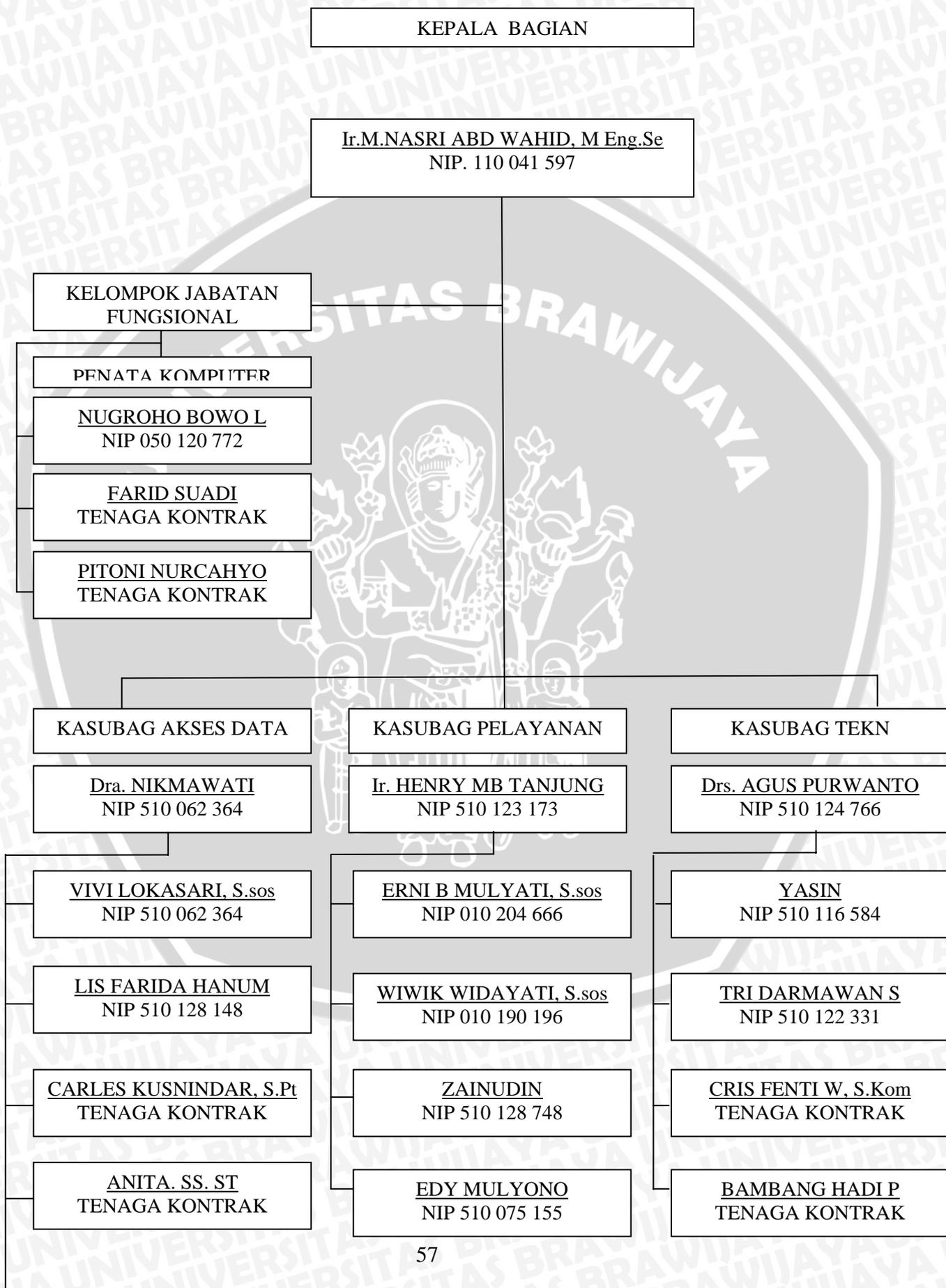
4. Pengendalian arus data masukan dan keluaran, pengoperasian computer, penyiapan data, penyediaan data dan pengamanan perangkat keras/linak computer, serta pengamanan data sesuai klasifikasi
5. Pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputersasi kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
6. Pelaksanaan kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelolaan data elektronik
7. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia
8. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain
9. penyelenggaraan pengamanan standar pelaksanaan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengelola data elektronik.

4.1.8 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bagian Pengelola Data Elektronik adalah sebagai berikut :

Gambar 4 Struktur Organisasi Bagian Pengelola Data Elektronik

Bagan Susunan Organisasi Bagian PDE



EKO SUSANTO
TENAGA KONTRAK

Elektronik membawahi:

1. Sub Bagian Pengelolaan Data
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi internal
 - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan data elektronik
 - c. Melaksanakan pengelolaan data elektronik meliputi menghimpun verifikasi, klasifikasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data elektronik
 - d. Melaksanakan pengelolaan *data base* SKPD
2. Sub Bagian Pelayanan Data
 - a. Melaksanakan penyusunan program, rencana dan laporan evaluasi
 - b. Melaksanakan pelayanan teknologi informasi meliputi pelayanan multimedia, presentasi dan data elektronik olahan lainnya
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan *workshop* implementasi produk teknologi informasi
 - d. Melaksanakan penyiapan kompetensi teknologi informasi meliputi SDM administrator jaringan administrator system informasi manajemen (SIM)
3. Sub Bagian Teknologi Informasi
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknologi informasi
 - b. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware* meliputi *server*, computer dan perangkat pendukungnya
 - c. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan computer
 - d. Melaksanakan pengelolaan system dan teknologi informasi

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik.

4.1.9 Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Kabupaten Malang online merupakan salah satu pilot project di KPDE adalah suatu system informasi terintegrasi yang menghubungkan secara on line baik antar dinas / instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Kecamatan selaku penyedia dan pengguna informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebanyak-banyaknya melalui internet yang cepat, tepat, akurat dan terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah untuk mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan daya saing serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. karena keterbatasan sarana dan prasarana sebagai tahap awal instansi yang dilibatkan sebanyak 33 Kecamatan dan 5 instansi Penggali PAD yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Perlengkapan dan Kantor Kasda yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Rencana fasilitas yang akan dibangun antara lain :

1. Membangun jaringan informasi & komunikasi antara kecamatan dan Kabupaten Malang. Untuk perluasan jangkauan informasi dan komunikasi tentang pembangunan dan potensi daerah serta pemberdayaan masyarakat
2. Pembangunan server-server di pusat dan di daerah (Kecamatan)
3. Pembuatan sistem informasi profil kecamatan
4. Pembuatan sistem informasi melalui media monitor touch screen untuk penyebaran informasi
5. Penyebaran informasi melalui situs web <http://www.kabmalang.go.id/>
6. Proses pengembangan aplikasi di Dinas / Instansi
7. Proses pengembangan integrasi aplikasi dinas / instansi kedalam satu jaringan on line
8. Proses pengembangan aplikasi layanan publik secara on-line dan system berbasis web site.

4.1.10 Kondisi sumber Daya Manusia Bagian Pengelola Data Elektronik

Jumlah sumber daya manusia di Bagian Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang berjumlah 21 orang. Dibawah kepala bagian terdapat bagian-bagian yang menangani bidangnya masing-masing. Pada Bagian Pengolahan Data Elektronik juga terdapat spesifikasi sumber daya manusia, untuk sub bagian tugas dalam menangani situs web pemerintah daerah.

a). Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah Personil Kantor Pengolahan Data Elektronik terjabarkan sebagai berikut :

Tabel I
Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Bagian	1 orang
2	Kasubag Akses Data	1 orang
3	Kasubag Pelayanan Data	1 orang
4	Kasubag Teknologi Informasi	1 orang
5	Penata Komputer	1 orang
6	Staff	16 orang
	Jumlah	21 orang

(Sumber : Bagian PDE Kabupaten Malang)

Berdasarkan tabel rekapitulasi jumlah pegawai menurut jabatan, dapat diketahui bahwa pada Bagian Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang telah terdapat pendelegasian wewenang dan pembagian tugas, dalam hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi.

b). Jumlah personil berdasarkan pendidikan

Tabel II
Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana (S2)	1 Orang
2	Sarjana (S I)	10 Orang
3	Diploma (D III)	0 Orang
4	SLTA	8 Orang
5	SD	2 orang
	Jumlah	21 Orang

(Sumber : Bagian PDE Kabupaten Malang)

c). Jumlah personil berdasarkan golongan

Tabel III
Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Tingkat Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/a	1 Orang
2	III/d	1 Orang
3	III/c	3 Orang
4	III/b	2 Orang
5	III/a	1 Orang
6	IId	1Orang
7	IIC	3 Orang
8	Honorer	6 Orang

	Jumlah	21 Orang
--	---------------	-----------------

(Sumber : Bagian PDE Kabupaten Malang)

d). Spesifikasi Sumber Daya Manusia

Tabel IV

Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Bagian Pengolahan Data Elektronik Menurut Spesifikasi SDM

NO	SPEKIFIKASI SDM	JUMLAH
1	Staf Desktop Publishing	1 Orang
2	Staf Desain Homepage	7 Orang
3	Staf Animasi Grafis	1 Orang
4	Staf Pemograman Visual	1 Orang
5	Staf Administrator dan Teknisi Jaringan	1 Orang
6	Operator SIG	4 Orang
7	Operator	5 orang
	Jumlah	21 Orang

(Sumber : Bagian PDE Kabupaten Malang)

4.1.11 Prasarana Bagian Pengelola Data Elektronik

Setiap instansi pemerintahan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk menunjang setiap aktivitas dari pegawai dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kantor ini di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, agar diperoleh kinerja yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas pegawai negeri sipil pada Bagian Pengelola Data Elektronik, yaitu :

1. Lokasi

Bagian Pengelola Data Elektronik berlokasi di Kantor Pemerintahan Kabupaten Malang yang beralamat di Gedung Sekretariat Daerah Lt3

Bagian Pengelola Data ELelektronik Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang
Email : mailto:kpdemlg@kabmalang.go.id. dimana berdasarkan pada tugas dan fungsi dari Bagian Pengelola Data Elektronik berhubungan langsung dengan pelayanan serta pemberian informasi kepada masyarakat Kabupaten Malang

2. Komputer

Setiap aktivitas pegawai pada kantor ini sangat tergantung pada komputer sebagai sistem informasi yang berfungsi sebagai data base, menyimpan dokumen, arsip instansi, membuat laporan, mengolah data untuk dijadikan bahan kebijakan, memberikan informasi tentang Kabupaen Malang beserta instansi-instansi yang ada di lingkup Kabupaten Malang, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang.

3. Laptop

Selain terdapat komputer pada setiap ruangan, kantor ini juga menyediakan laptop untuk beberapa bidang tertentu yang memang memerlukan peralatan tersebut untuk dapat membantu pekerjaan pegawai karena komputer dipakai untuk menyimpan dokumen dan laptop ini digunakan untuk mengetik data setiap harinya apabila komputer yang ada sedang dipakai oleh pegawai lain.

4. Mesin Ketik

Meskipun telah dilengkapi dengan beberapa komputer, namun mesin ketik masih digunakan untuk beberapa laporan yang dikerjakan oleh para pegawai pada setiap bidang.

4. AC

Dikantor ini menyediakan AC pada setiap ruangan untuk mendukung fasilitas pada ruangan, dimana pegawai pada kantor ini sering berada didalam ruangan untuk mengerjakan tugas-tugasnya.

Prasarana pada Bagian Pengelola Data Elektronik:

- a. Komputer : 8 unit
- b. Printer : 2 unit
- c. Mesin Ketik Manual : 1 unit

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Visi Misi Pengelolaan Data Elektronik di Kabupaten Malang

Visi dan misi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten malang dapat dilihat dari program pembangunan lima tahun yang dibuat oleh bagian pengelola data elektronik pemerintah kabupaten malang. Bagian pengelola data elektronik mempunyai program prioritas jangka pendek selama lima tahun dari kurun waktu 2001 sampai 2005 dengan program-program sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2001
 - a. pembangunan dan pengembangan teknologi jaringan secara online termasuk system aplikasi yang dibutuhkan
 - b. peningkatan fungsi profesionalisme sumber daya manusia
 - c. pengolahan data dan emeliharaan data sebagai bahan penyiapan informasi terpilih
 - d. pembinaan komputerisasi
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Tahun Anggaran 2002
 - a. pengembangan dan remediasi perangkat keras/lunak dan jaringan lanjutan
 - b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - c. pengumpulan pengolahan data dan pemeliharaan data
 - d. rencana pembangunan warung internet di tingkat kecamatan
 - e. persiapan dalam rangka mendukung program telematika
3. Tahun Anggaran 2003
 - a. pengembangan/perawatan perangkat keras/lunak dan jaringan lanjutan
 - b. pembinaan sumber daya manusia
 - c. pengumpulan/pengolahan data dan pemeliharaan data

- d. pembangunan warung internet di wilayah kecamatan
 - e. perencanaan program telematika lanjutan
 - f. perencanaan dan pengembangan program komputerisasi dalam rangka membantu program UPT
4. Tahun Anggaran 2004
 - a. pembinaan sumber daya manusia
 - b. pengolahan dan pengumpulan data
 - c. pemberdayaan warung internet di wilayah kecamatan
 - d. pengembangan perangkat keras/lunak jaringan
 - e. program telematika lanjutan
 - f. penghambatan program UPT
 5. Tahun Anggaran 2005
 - a. pemberdayaan sumber daya manusia
 - b. pengumpulan dan pengolahan data (pemuthakiran data)
 - c. pengembangan dan perawatan perangkat keras/lunak jaringan
 - d. pengembangan warung internet di wilayah kecamatan
 - e. peningkatan telematika (telekomunikasi dan informatika)
 - f. pemberdayaan program UPT

”Implementasi *e-government* sangat kompleks, tidak semudah dan sederhana namun setidaknya kami telah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Proses ini masih terus berjalan. Kita sedang berada pada tahap pengembangannya”
(wawancara dengan Bpk Nugroho, Pengelola Komputer)

Visi dan misi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat merujuk pada lampiran Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Strategi itu adalah :

1. mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain perluasan dan peningkatan jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Pembentukan portal informasi dan pelayanan public yang

dapat mengintegrasikan system manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

2. menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara holistic. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata system manajemen dan prosedur pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi secara cepat.

3. memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi antar portal pemerintah, yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik.

4. mengembangkan kapasitas SDM baik pemerintah maupun pemerintah daerah dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat

5. melakukan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistic dan terukur dalam pengembangan *e-government*, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu persiapan, perencanaan, pematangan, dan pemanfaatan.

4.2.2

4.2.2.1 Bentuk Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengembangan produk teknologi informasi dan komunikasi diwujudkan melalui “Kabupaten Malang On line” oleh Bagian Pengelola Data Elektronik. Produk-produk tersebut antara lain:

1. aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang telah dibangun
 - a. Web Site Kabupaten Malang <http://.kabmalang.go.id>
 - b. Aplikasi interaktif “informasi untuk anda”
 - c. SIM Kecamatan
 - d. SIM Pendapatan Asli Daerah
 - e. SIM Informasi Keuangan
 - f. SIM Perencanaan Pembangunan
 - g. SIM Eksekutif
 - h. SIM Manajemen Aset Daerah
 - i. SIM Rumah Sakit Daerah

j. SIM Pendidikan

2. aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang dibangun tahun 2003

- a. SIM Agribisnis Mantung
- b. SIM Pendidikan
- c. SIM KASDA
- d. SIM PAD II
- e. Geografis Information System (GIS)

4.2.2.2 Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel V Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Telematika

DATA HARDWARE DAN SOFTWARE PENDUKUNG KEGIATAN
TELEMATIKA KABUPATEN MALANG

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2003	2004	2005
1	Server dan Hardware Pendukung TI	Unit	4	4	4
	Data Base Server	Unit	1	1	1
	Mail/proxy server	Unit	4	4	4
	Web Server	Unit	19	19	19
	Computer PC multimedia touchscreen	Unit	2	2	3
	Computer PC	Unit	6	6	6
	Laptob Intel Platinum	Unit	43	43	43
	UPS 1000 watt	Unit	3	3	3
	ModemWireless LAn	Unit	6	6	6
	Stabilizer Feroresonan	Unit	2	2	2
	Printer HP	Unit	1	1	3
	Printer Epson	Buah	1	1	1
	Global Position Sistem (GPS)	Buah	2	2	2
	LCD Projector	Buah	1	1	1
	Handycamp Digital Layar LCD	Buah	2	2	2
	2	Hardware Kecamatan			



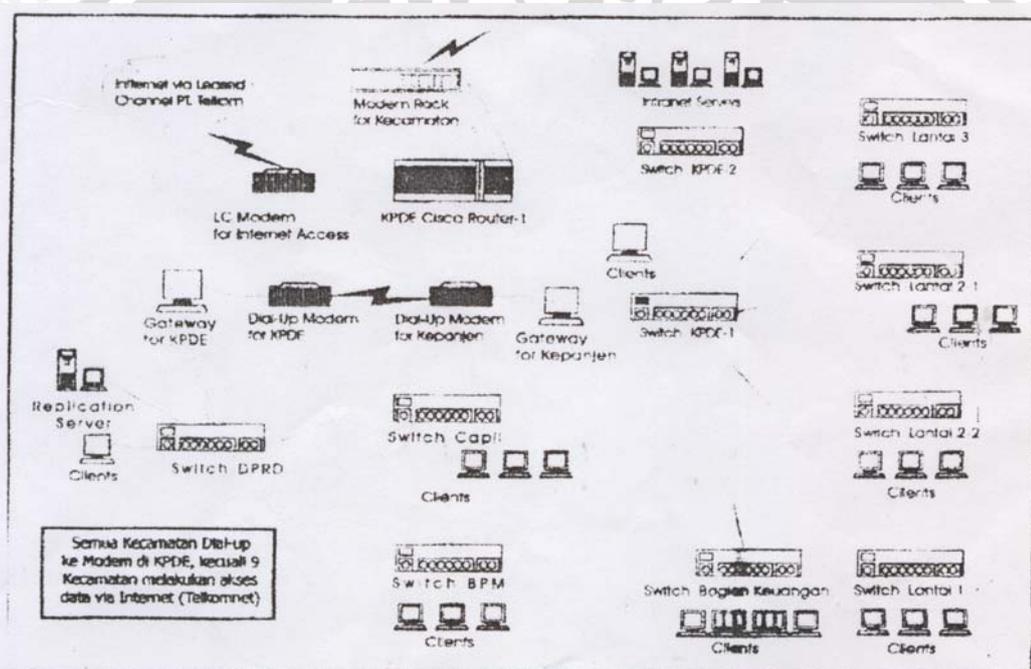
	Computer PC	Unit	33	33	33
	UPS	Unit	33	33	33
	Modem	Unit	33	33	33
	Printer	Buah	33	33	33
	Laminating	Buah	33	33	33
3	Hardware Unit Kerja				
	Komputer PC	Unit	19	19	19
	UPS	Unit	5	5	5
	Printer	Buah	5	5	5
	Penangkal Petir	Buah	-	3	3
4	Instalasi Kabel Sistem Jaringan				
	Bagian	Line	9	9	9
	Kantor	Line	4	4	4
	Dinas	Line	6	6	6
	Badan	Line	4	4	4
	Lembaga	Line	1	1	1
	Ruang Bupati	Line	1	1	1
5	Software Sistem Operasional				
	Windows 2000 Server	Unit	1	1	1
	Windows 2000 Profesional	Unit	1	1	1
	Linux Red Had 7.0	Unit	1	1	1
	Arc Info Versi 4.0	Unit	1	1	1
	Arc Info Versi 3.3	Unit	1	1	1
	Arc IMS Versi 4.0	Unit	1	1	1
	ER Mapper 6.3	Unit	1	1	1
	Windows XP Profesional	Unit	-	-	1
	English/SP2	Unit	-	-	1
	Windows 2000 Advance Server	Unit	-	-	1
	Symantec Antivirus	Unit	-	-	1
	Symantec Antivirus Corporate				
	Edition and Network Server	Unit	-	-	1
	Media Pac				
	Windows 2000 Advance Server	Unit	-	-	1
	English Disk W/SP4				
6	Sistem Informasi Manajemen				
	Kecamatan	Unit	1	1	1
	Sekretariat Bupati	Unit	7	-	-
	Eksekutif	Unit	1	1	1
	Badan/Dinas/Kantor/Bagian	Unit	-	8	8
	Agribisnis Mantung	Unit	-	1	1
7	Sistem Informasi Geografis				
	(SIG)	Kec	33	33	33
	Peta Vektor Skala 1 : 25.000	Kec	33	33	33

	Peta Citra Landsat Skala 1 : 25.000 Peta Citra Ikonos Skala 1 : 25.000 Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000	Kec Kec	33 -	33 1	33 1
8	Jaringan Online Kabmalang.go.id Saluran Indosat Saluran Telepon	Kpbs Saluran	128 46	128 46	128 46
9	Operator Jaringan Online Kecamatan Badan/Dinas/Kantor/Bagian	Orang Orang	33 42	33 42	33 42
10	Perawatan dan Pemeliharaan Komputer Server Stabilizer Jaringan	Unit Unit Unit Unit	80 5 3 192	80 5 3 192	80 5 3 192
11	Web Unit Kerja Dinas Badan Kantor Bagian Lembaga Kecamatan	Situs Situs Situs Situs Situs Situs	19 8 8 9 2 33	14 8 1 11 2 33	14 8 1 11 2 33

Sumber : KPDE Kabupaten Malang

4.2.2.3 Tipologi Jaringan

Gambar 5 Tipologi Jaringan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Malang



(Sumber: KPDE Kabupaten Malang)

4.2.2.4 Pengolahan Informasi Pada Media Komunikasi Pemerintah Kabupaten Malang

Gambar 6 Tampilan Situs Pemrintah Kabupaten Malang



Data yang telah diolah oleh Bagian Pengolahan Data Elektronik ditayangkan sebagai informasi dalam *homepage* web Pemerintah Kabupaten Malang. Berdasarkan tampilan web resmi Kabupaten Malang dapat digambarkan informasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Malang.

a. Gambaran Umum

Situs Web www.malangkab.go.id dikembangkan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang. Situs ini berisi informasi terintegrasi yang menghubungkan secara online antar Badan, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun antar Kecamatan-kecamatan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta instansi lain dan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Malang. System ini juga menghubungkan secara *online* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang.

Situs ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malanga akan tersedianya data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat serta terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang akan tetapi juga mampu memfasilitasi daerah untuk mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Berikut ini penjelasan menu layanan yang ada di situs www.malangkab.go.id

a) Menu Utama, yang berisi beberapa hal berikut

1. About

Berisi tentang selayang pandang Kabupaten Malang, sejarah tentang berdirinya Kabupaten Malang diceritakan dari jaman kerajaan hingga menjadi Kabupaten Malang, maskot Kabupaten Malang untuk fauna berupa burung cucak ijo sedangkan mascot untuk flora adalah apel manalagi (*Malus Sylvestris*) untuk mascot flora dan fauna ini telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 180/170/SK/429.013/1997, arti lambang berupa penjelasan tentang lambang Kabupaten Malang, letak geografis menjelaskan tentang letak Kabupaten Malang batas wilayah geologi topografi hingga jenis tanah, periode bupati.

2. Profile

Memuat visi misi Kabupaten Malang, struktur organisasi, tugas dan fungsi, POLDAS, rencana strategis, dan PROPERDA.

3. Investasi

Berisi tentang potensi investasi yang ada di Kabupaten Malang, dengan link investasi memudahkan pihak swasta untuk masuk dan mengetahui investasi apa yang ada di kabupaten Malang.

4. Pemerintahan

Berisi profil Bupati Malang, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eksekutif

5. Potensi Daerah

Potensi Daerah, berisi informasi mengenai potensi daerah Malang, produk unggulan, pariwisata, industri, agrobisnis, seni dan budaya, handcraft, galian industry, galian keramik, galian bangunan, dan galian vital.

b) Surat Pengaduan, berhubungan dengan surat pengaduan dari masyarakat untuk bupati maupun Badan, Dinas, Kantor yang ada di lingkup Kabupaten Malang, surat pengaduan dalam website lebih dikenal dengan surat warga. Surat warga akan dijawab oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keluhan yang ditujukan masyarakat untuk Dinas/Badan/Bagian/Kantor di lingkup Kabupaten Malang

Hal ini diungkapkan oleh Bpk Nugroho Staff Pengelola Komputer Bagian PDE

“apabila terdapat keluhan, saran, masukan, pendapat, serta pertanyaan atau keluhan atas ketidakpuasan masyarakat pada kinerja Pemerintah Kabupaten Malang kami masukkan dalam kolom surat warga yang akan ditindak lanjuti oleh staf kami dan dijawab langsung oleh yang berwenang”

Banyaknya surat warga yang masuk dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Malang membuat tanggapan dari instansi terkait di lingkup Kabupaten Malang tidak berjalan cepat.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bpk Nugroho Staff Pengelola Komputer Bagian PDE

“Banyaknya pertanyaan, kritik dan saran maupun keluhan dari masyarakat membuat kami berusaha secepat mungkin untuk memberikan jawaban, namun kita mempunyai kendala yaitu terbatasnya personel sehingga tanggapan yang kami berikan tidak serta merta dapat dilaksanakan”

- c) Buku Tamu
- d) Artikel, berisi tentang artikel-artikel yang dikirimkan oleh masyarakat Kabupaten Malang serta artikel dari seminar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang.
- e) Pelayanan publik, berisi tentang pelayanan public yang disediakan Pemerintah Kabupaten Malang dari pelayanan ketenagakerjaan, KTP, kelahiran, kematian, ijin usaha, ijin mendirikan bangunan dan lain-lain.

Hal ini juga juga diungkapkan oleh Bpk Nugroho staff Bagian PDE, Pengelola Komputer

“kami berusaha memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Malang mengenai tata-cara birokrasi yang berhubungan dengan pemerintah misalnya mengenai perijinan, pembuatan KTP, akta kelahiran, kematian, memasang reklame, membuat NPWP bisa dilihat dalam situs kami “

- f) Eksekutif
- g) Legeslatif
- h) Foto kegiatan, tentang foto-foto kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
- i) Agenda Bupati
- j) Jadwal ruang rapat
- k) Link lembaga
- l) Link usaha
- m) Link sekolah

- n) Link komunitas
- o) Database, berhubungan dengan data mengenai tata ruang wilayah (RTRW), bank data, hasil-hasil pembangunan, industry, kepegawaian, produk hukum, koperasi.
- p) SIMDA, Sistem Informasi Daerah, yang bisa diakses oleh instansi bersangkutan. Setiap instansi yang berkompoten berkewajiban melakukan *update* informasi yang sudah ditentukan yang selanjutnya akan diolah Bagian Pengelola Data Elektronik untuk diinformasikan kepada masyarakat. Terdapat mekanisme *password* atau kata kunci khusus yang hanya diketahui oleh yang berhak melakukan perubahan data.
- q) Cuaca serta beragam informasi lain yang mampu menggambarkan keadaan sesungguhnya.
- r) Poling tentang pelayanan public yang ada di Kabupaten Malang
- s) Pengumuman , memuat tentang pengumuman kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang, olahraga, bursa kerja berisi lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Malang.
- t) Selain informasi diatas , masih ada informasi lain dalam website Pemerintah Kabupaten Malang. Informasi tersebut berada dalam subdomain website Pemerintah Kabupaten Malang. Informasi sesuai dengan masing-masing unit kerja sesuai ketentuan Bagian Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang. Informasi ini berisi tentang Dinas/Badan/Bagian/Kantor yang ada di lingkup Kabupaten Malang. Standart isi dari profile Dinas/Badan/Bagian/Kantor adalah:

1. Selayang pandang/ profile Dinas/Badan/Bagian/Kantor
2. Tugas dan fungsi
3. Program kerja Dinas/Badan/Bagian/Kantor
4. Kondisi sumber daya manusia
5. Produk-produk yang dihasilkan

b. Pengembangan Situs Resmi Kabupaten Malang

Pengembangan situs resmi Kabupaten Malang sejalan dengan program Bagian Pengelola Data Elektronik. Dimana Malang *online* adalah salah satu pilot project di Bagian PDE yang merupakan suatu system informasi terintegrasi yang menghubungkan secara *on line* baik antar dinas / instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Kecamatan selaku penyedia dan pengguna informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebanyak-banyaknya melalui internet yang cepat, tepat, akurat dan terpadu.

Hal ini diungkapkan oleh ibu Dra. Nikmawati Staff Akses Data Bagian PDE “Kami memiliki informasi manajemen Dinas/Badan/Bagian/Kantor dan kecamatan yang diantaranya berisi data tentang profil organisasi tupoksi, sumber daya manusia, maupun produk dari organisasi misalnya tentang perijinan, pembuatan KTP kematian, kelahiran, sedangkan untuk kecamatan berisi data mengenai realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan untuk setiap Kecamatan di wilayah kerja kami. Hal ini sebagai upaya kami dalam mengupayakan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Setiap operator mengupdate data untuk Dinas/Badan/Bagian/Kantor dilakukan setiap tiga bulan sekali sedangkan untuk kecamatan mengenai realisasi pendapatan PBB biasanya dilakukan pada hari jumat setiap minggunya.

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan daya saing serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. karena keterbatasan sarana dan prasarana sebagai tahap awal instansi yang dilibatkan sebanyak 33 Kecamatan dan 5 instansi Penggali PAD yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Perlengkapan dan Kantor Kasda yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Rencana fasilitas yang akan dibangun antara lain :

1. Membangun jaringan informasi & komunikasi antara kecamatan dan Kabupaten Malang. Untuk perluasan jangkauan informasi dan komunikasi tentang pembangunan dan potensi daerah serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pembangunan server-server di pusat dan di daerah (Kepanjen)

3. Pembuatan sistem informasi profil kecamatan
4. Pembuatan sistem informasi melalui media monitor touch screen untuk penyebaran informasi
5. Penyebaran informasi melalui situs web
<http://www.kabmalang.go.id/>
6. Proses pengembangan aplikasi di Dinas / Instansi
7. Proses pengembangan integrasi aplikasi dinas / instansi kedalam satu jaringan on line
8. Proses pengembangan aplikasi layanan publik secara on-line dan system berbasis *web site*.

4.2.2.5 Rekapitulasi Peremajaan data Web/Badan/Dinas/Kantor/Bagian

Berikut ini rekapitulasi peremajaan data web dinas/badan/kantor/bagian yang dilakukan secara rutin setiap saat, yang dievaluasi setiap triwulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebaruan data.

Tabel VI Rekapitulasi Peremajaan Web

No	INSTANSI BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	LAPORAN		
		Sudah	Belum	keterangan
A	Dinas			
1	Pendidikan	√		Telah di <i>udate</i>
2	Pemuda dan Olahraga	√		Telah di <i>udate</i>
3	Kesehatan		√	Belum mengirimkan data
4	Social		√	Belum mengirimkan data
5	Tenaga Kerja		√	Dalam proses perbaikan
6	Perhub, komunikasi		√	Dalam proses perbaikan
7	Kependudukan		√	Dalam proses perbaikan
8	Kebudayaan Pariwisata	√		Telah di <i>udate</i>
9	Bina Marga		√	Belum mengirimkan
10	Pengairan		√	Belum mengirimkan
11	Cipta Karya/Tata Ruang	√		Telah di <i>udate</i>
12	Perindustrian	√		Telah di <i>udate</i>
13	Koperasi		√	Belum mengirimkan
14	Pertanian,Perkebunan		√	Belum mengirimkan
15	Energi		√	Belum megirimkan
16	Kelautan		√	Belum mengirimkan
17	Kehutanan	√		Telah di <i>udate</i>

18	Peternakan	√		Telah di <i>udate</i>
19	Pendapatan	√		Telah di <i>udate</i>
20	Pelayanan Perizinan	√		Telah di <i>udate</i>
B	Badan			
1	Inspektorat Kabupaten	√		Telah di <i>udate</i>
2	Kepeg Daerah	√		Telah di <i>udate</i>
3	Perenc. Pembangunan	√		Telah di <i>udate</i>
4	Penelitian & Pengmbng		√	Belum mengirimkan
5	Kesn. Bangsa Politik		√	Belum mengirimkan
6	Lingkngn.Hidup	√		Telah di <i>udate</i>
7	Ketahanan Pangan	√		Telah di <i>udate</i>
8	Pemberdayaan Masy	√		Telah di <i>udate</i>
9	Pendidikan Pelatihan	√		Telah di <i>udate</i>
10	Keluarga Berencana	√		Telah di <i>udate</i>
11	Perpustakaan	√		Telah di <i>udate</i>
C	Kantor			
1	SATPOL PP	√		Telah di <i>udate</i>
2	Penanaman Modal	√		Telah di <i>udate</i>
3	Pemberdayaan Permpn	√		Telah di <i>udate</i>
4	Perumahan		√	Belum mengirimkan
D	Bagian			
1	Tata Pem. Umum	√		Telah di <i>udate</i>
2	Tata Pem. Desa	√		Telah di <i>udate</i>
3	Pertanahan	√		Telah di <i>udate</i>
4	Hokum	√		Telah di <i>udate</i>
5	Perekonomian	√		Telah di <i>udate</i>
6	Kerjasama	√		Telah di <i>udate</i>
7	Admins. Pembangunan	√		Telah di <i>udate</i>
8	PDE	√		Telah di <i>udate</i>
9	Umum & Protokol	√		Telah di <i>udate</i>
10	Tata Usaha	√		Telah di <i>udate</i>
11	Humas	√		Telah di <i>udate</i>
12	Organisasi	√		Telah di <i>udate</i>
13	Bina mental,Kerohanian		√	Belum mengirimkan
14	Kesejahteraan Rakyat	√		Telah di <i>udate</i>

(Sumber : Bagian PDE Kabupaten Malang)

Informasi yang ada di website Pemerintah Kabupaten Malang *diupdate* setiap tiga bulan sekali, setiap instansi-instansi yang ada di lingkup Kabupaten Malang wajib menyerahkan informasinya melalui internet antar instansi, sebelum ditampilkan dalam website informasi tersebut diolah terlebih dahulu oleh Bagian Pengelola Data Elektronik sebagai instansi yang bertanggung jawab dengan pengolahan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Kabupaten Malang.

“ selama ini terdapat keengganan dari beberapa departemen untuk saling bertukar data atau informasi, system yang tertutup seringkali menghambat instansi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kegiatannya padahal sebenarnya data tersebut dimiliki oleh instansi lain, hal ini dikarenakan terdapat proyek-proyek tersendiri ”

(wawancara dengan Bpk Nugroho, Pengelola Komputer)

4.2.4 Peran Sumber Daya Aparatur

Berikut ini adalah peran sumber daya aparatur dalam pengolahan teknologi informasi dan komunikasi :

1. Peran Sumber Daya Aparatur Dalam Pengolahan Data
 - a. Melaksanakan pengolahan administrasi internal
 - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengolahan data elektronik
 - c. Melaksanakan pengelolaan data elektronik meliputi menghimpun, verifikasi, klasifikasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data elektronik
 - d. Melaksanakan pengelolaan *data base* SKPD
2. Peran Sumber Daya Aparatur Dalam Pelayanan Data
 - a. Melaksanakan penyusunan program, rencana dan laporan evaluasi
 - b. Melaksanakan pelayanan teknologi informasi meliputi pelayanan multimedia, presentasi dan data elektronik lainnya
 - c. Melaksanakan penyiapan kompetensi teknologi informasi meliputi administrator jaringan dan administrator system informasi manajemen
3. Peran Sumber Daya Aparatur Dalam Pengembangan Teknologi Informasi
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknologi informasi
 - b. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware*, meliputi *server*, computer dan perangkat pendukungnya
 - c. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan computer
 - d. Melaksanakan pengolahan system dan teknologi informasi

4.2.3 Evaluasi Kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik Kabupaten Malang

Tabel VII Evaluasi Kinerja

NO	RENCANA KERJA	RINCIAN	KETERANGAN
1.	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan perangkat perundang-undangan • Analisa kebutuhan informasi dan model pengolahan data • Pengembangan system perangkat lunak/aplikasi • Pengembangan system perangkat keras • Pembinaan SDM • Peningkatan pengumpulan data • Rencana pembangunan system jaringan • Pembinaan teknis dan evaluasi system komputerisasi • Pembangunan dan pengembangan system jaringan internet dan intranet 	sudah dilaksanakan
2	Pematangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Home Page • Pengembangan situs Kabupaten Malang • Pengembangan media interaktif ekspos Kab.Malanga • Perawatan software internet dan intranet 	sudah dilaksanakan

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan link dengan lembaga lain 	
3	Pemantapan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah berusaha memberikan layanan yang lebih baik menuju ke arah e-government • Pembuatan situs operability, dimana antar situs saling bertukar informasi 	sudah dilaksanakan
4	Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan masyarakat • Pelayanan prima • Pemberian informasi pada masyarakat 	Dimaksudkan agar e-government bermanfaat bagi masyarakat

(Sumber : Bagian PDE Kabupaten Malang)

Dari table diatas terjabarkan evaluasi kinerja pada Bagian Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Malang. Mulai tahap persiapan yang diawali dengan penyiapan perangkat perundang-undangan, menyiapkan model analisa data serta analisis akan kebutuhan informasi, pengembangan system perangkat lunak dan perangkat keras, pengembangan sumber daya aparatur sebagai bagian yang menentukan berhasil tidaknya program yang direncanakan. Sampai pada tahap pemanfaatan, dimana program yang direncanakan berhasil dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Malang, untuk mendapatkan informasi mengenai Kabupaten Malang dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, pariwisata, potensi daerah, instansi-instansi di Kabupaten Malang serta pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Malang

Harapan yang ingin dicapai adalah:

1. Perlunya menyamakan persepsi percepatan penguasaan kompetensi dasar Teknologi Informasi
 2. Perlunya memberikan perhatian untuk pemberdayaan tenaga Teknologi informasiII agar e-goverenment dapat berjalan sebagaimana diharapkan.
- (wawancara dengan Bpk Nugroho, Pengelola Komputer)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Gambaran Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Malang

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Malang terintegrasi secara *online*, dimana didalamnya terdapat interaksi dua arah yang merupakan tahapan *egovernment* yang merupakan bagian dari pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Malang. Implementasi *e-government* di Kabupaten Malang masih dalam tahap awal, berdasarkan indikator menurut Indrajit, tahap perkembangannya masih berada pada tahap *interact*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Komunikasi dua arah. Dapat kita lihat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Malang, warga Kabupaten Malang dapat berinteraksi dengan semua instansi di lingkup Kabupaten Malang, dari Badan, Bagian, Kantor, dan jajaran eksekutif di Kabupaten Malang melalui media “surat warga”.
2. Terdapat dua jenis aplikasi yang dipergunakan, yaitu bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *search* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik mengenai Kabupaten Malang dan instansi-instansi yang ada di lingkup Kabupaten Malang. Aplikasi kedua pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu, baik secara langsung (*chatting, tele-conference, dsb*) maupun tidak langsung (*email, surat, mailing, list*). Sebagai contoh, di situs Bagian Pengelola Data Elektronik, terdapat sebuah aplikasi yaitu “forum” yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi secara *online* dan *realtime*.

Pengembangan proyek ini juga didukung oleh INPRES Nomor 3 Tahun 2003 dan memiliki enam strategi dalam misinya untuk

pengembangan *e-government*. Berkaitan dengan meningkatnya interaksi antar komponen masyarakat, *e-government* memegang peranan penting. Kita mengenal tiga pola hubungan yang dapat kita lihat dalam *e-government*, yaitu pemerintah dengan bisnis G2B, pemerintah dengan masyarakat G2C, dan pemerintah dengan pemerintah G2G, yang bisa diklasifikasikan menjadi dua, baik intra departemen maupun antar departemen dalam pemerintah.

Jika kita ingin mengukur keberhasilan maka peluangnya sangat kecil, karena tidak ada standart yang dijadikan parameter untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan *e-government*. Hal ini didukung kenyataan bahwa tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah berbeda satu sama lain. Instansi pemerintah yang ada dipusat (departemen dan nondepartemen) memiliki tata laksana operasional yang berbeda dengan instansi pemerintah di daerah yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Ukuran kepuasan pelanggan lazim digunakan perusahaan bisnis tidak sepenuhnya dapat diterapkan di instansi pemerintah, apalagi instansi pemerintah yang hanya melayani instansi pemerintah lainnya. Demikian pula tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi investasi dibidang teknologi informasi seperti peningkatan efisiensi, penghematan biaya, percepatan layanan dan potensi peningkatan penghasilan tidak serta merta dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam mengelola data elektronik. Namun kita dapat memiliki gambaran yang lebih baik mengenai seluk beluk pola interaksi ini, kita dapat melihat faktanya melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Malang.

4.3.2 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditinjau Dari Interaksi *e-Government* di Kabupaten Malang

4.3.2.1 Pola Hubungan Pemerintah Dengan Bisnis

Pemeintah Kabupaten Malang membuat berbagai macam regulasi yang ditujukkann untuk mengatur perdagangan barang dan jasa. Hal ini ditujukan karena banyaknya perda yang mengatur hal ini. Melalui situs

www.malangkab.go.id Pemerintah Kabupaten Malang ingin memvisualisasikan kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Malang.

Terdapat berbagai macam model interaksi antara pemerintah dengan kalangan bisnis, yang semuanya mengarah pada isu akuntabilitas public dan kebutuhan akan transparansi. Pelayanan *online* merupakan komunikasi dua arah, dimana kita bisa mengisi berbagai macam formulir melalui internet ketika pihak pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan lelang secara terbuka dalam berbagai proyek yang terdapat di pemerintahan. Serta *e-reporting* pada saat pemerintah memberi penjelasan mengenai perkembangan di seputar Pemerintah Kabupaten Malang maupun evaluasi yang dilakukan melalui internet. Pelayanan yang disajikan oleh pemerintah untuk memulai hubungan relasional haruslah ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik

a. Karakteristik

Informasi yang ditujukan untuk pihak swasta pada situs Kabupaten Malang merupakan informasi satu arah, dimana pemerintah hanya memberikan informasi mengenai tata cara birokrasi yang berhubungan dengan instansi-instansi di lingkup Kabupaten Malang serta Investasi apa yang diperlukan dan ada di Kabupaten Malang. Upaya ini kurang untuk kepentingan kalangan bisnis dalam mendapatkan informasi yang lebih baik misalnya, dalam bertukar informasi.

b. Manajemen

Tidak ada manajemen khusus untuk menata hubungan ini, yaitu manajemen hubungan dengan customer. Customer dalam hal ini adalah kalangan bisnis. Tidak terdapat indikasi yang mengarah pada *e-procurement* atau *e-billing* sebagai upaya untuk membuka komunikasi yang lebih luas dan transparan dengan kalangan bisnis yang khususnya berkaitan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang selama ini sangat rentan dengan KKN karena adanya mekanisme penunjukan secara langsung.

c. Evaluasi

E-procurement merupakan upaya nyata yang dapat dilakukan pemerintah untuk menunjukkan komitmen atas transparansi dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Dengan lelang yang dilakukan melalui internet peluang manipulasi, korupsi, kolusi maupun penyelewengan lainnya dapat diminimalisir. Namun hambatan besar sering berasal dari pemerintah sendiri.

Dalam hubungan antara pemerintah dengan swasta terdapat peningkatan hubungan interaksi serta pertukaran informasi dengan pihak swasta misalnya investasi, hal ini memungkinkan pihak swasta asing untuk masuk ke wilayah Kabupaten Malang mengingat fleksibilitas internet sebagai jalur komunikasi global.

Peran pemerintah yang baik dan kompeten dibutuhkan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat atas keberadaan informasi ini, misalnya dengan sosialisasi maupun *workshop* yang dilakukan Bagian Pengolahan Data Elektronik untuk menginformasikan keberadaan dan bagaimana penggunaan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan.

4.3.2.2 Pola Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat

Dalam pengolahan teknologi informasi dan komunikasi, penyaluran informasi serta komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan melalui internet. Komunikasi dan system administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Ini berarti pelayanan pemerintah kepada masyarakat terjadi secara cepat. Informasi disediakan 24 jam sehari tujuh hari dalam satu minggu, tanpa harus menunggu dibukannya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.

Kita dapat mengetahui tabulasi pendapatan asli daerah (PAD) pembayaran PBB, informasi pelayanan yang ada di Kabupaten Malang, masyarakat juga dapat melakukan complain kepada instansi pemerintah dan legeslatif di lingkup Kabupaten Malang.

Tabel VIII Klasifikasi berdasarkan isi dalam “Surat Warga”

RENTANG WAKTU : 13 Juni 2008 s/d 13 Agustus 2008		
JUMLAH : 52		
No	KLASIFIKASI	JUMLAH
1.	Meminta penjelasan atau informasi	24
2.	Argumen/opini/himbauan	10
3.	Kritik dan saran	10
4.	Permohonan bantuan	5
5.	Penawaran jasa	3

Pengiriman dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malang dengan kebutuhan yang berbeda-beda dan dalam waktu yang tidak menentu. Hal ini dikarenakan surat warga terbuka dan bisa diisi oleh siapapun dengan content yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Hal ini juga diungkapkan staf Bagian Pengelola Data Elektronik sebagai pengelola situs.

a. Karakteristik

Masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah melalui internet. Dalam upaya menyajikan layanan kepada masyarakat yang ditampilkan dalam situs www.malangkab.go.id kombinasi informasi satu arah dan komunikasi dua arah sangat diperlukan, dimana cara pertama pemerintah memberikan informasi mengenai tata cara birokrasi yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat pada instansi-instansi di lingkup Kabupaten Malang, dan kedua bila ada permasalahan atau pertanyaan seputar kegiatan yang dilakukan masyarakat hal ini ditampung dalam sebuah sarana yaitu “surat warga” yang akan dihubungkan dengan instansi yang berwenang,

dan diungkap melalui perantasa staff Bagian Pengelola Data Elektronik sebagai penyelenggara situs.

b. Manajemen

Dalam mengatur hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada manajemen khusus. Terdapat beberapa sarana bagi warga untuk berinteraksi dengan pemerintah melalui buku tamu, yang berisi keterangan pengunjung di dalamnya juga terdapat survey mengenai kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah atas layanan pemerintah; surat warga digunakan untuk menampung kritik, keluhan yang ingin disampaikan masyarakat; artikel memuat berbagai pemikiran dan ide yang ingin disampaikan dan untuk diketahui seluruh masyarakat Kabupaten Malang; forum untuk berinteraksi antar pengunjung *website* Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk jalur komunikasi menyediakan sarana *contact* sebagai sarana informasi secara langsung dengan masing-masing instansi, selain itu pemerintah menyediakan *call center* yaitu jalur telepon khusus untuk menanggapi keluhan, kritik dan saran dari warga.

c. Evaluasi

Upaya untuk menjalin interaksi dengan masyarakat sudah mulai dilakukan. Ini dapat dilihat melalui surat warga semua aspirasi dan keluhan masyarakat Kabupaten Malang dapat dituangkan melalui “surat warga”. Dengan “surat warga pemerintah sangat terbantu dalam mengetahui hal-hal yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Media ini menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada jarak, masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah setiap waktu masyarakat membutuhkan.

4.3.2.3 Pola Hubungan Pemerintah Dengan Pemerintah

Hubungan pemerintah dengan pemerintah dibagi dua, yaitu antar departemen dalam pemerintahan dan hubungan internal departemen pemerintahan namun keduanya memiliki karakteristik yang tidak berbeda.

Bekerjasama antar dua departemen dalam pemerintah dan berbagi data dengan leluasa merupakan hal yang berbeda. Fakta yang terdapat

dalam situs Pemerintah Kabupaten Malang, terdapat upaya mengintegrasikan system informasi antar masing-masing departemen, hal ini dapat dilihat melalui layanan bank data.

Namun demikian data yang disampaikan masih sangat terbatas, karena hanya berdasarkan olahan Bagian PDE. Hal ini disebabkan karena adanya keengganan di dalam departemen di pemerintahan untuk saling bertukar data dengan bebas, terdapat birokrasi proses yang rumit dan berlaku apabila suatu departemen ingin mendapatkan data dari departemen lain.

hal lain yang perlu kita cermati yaitu surat warga, yang dapat menjadi acuan pemerintah untuk menanggapi masukan dari berbagai pihak dan hal ini juga bisa berasal dari kalangan birokrat. Melalui surat warga dimungkinkan interaksi yang tidak terbatas yang memudahkan seseorang untuk meminta dan memberikan sesuatu bagi perkembangan daerah

a. Karakteristik

Komunikasi dan informasi dengan instansi-instansi dilakukan melalui jaringan internet, baik intranet maupun ekstranet. Bagian Pengelola Data Elektronik memberikan tawaran kepada institusi di lingkup Kabupaten Malang untuk membuat situs, dan itu telah diwujudkan walaupun hanya berisi informasi tentang instansi. Situs yang dibuat instansi-instansi tersebut juga disajikan dalam situs www.malangkab.go.id Bagian PDE mengolah data dan informasi tersebut untuk disajikan kepada public maupun sarana bagi instansi-instansi pemerintahan untuk saling berkomunikasi.

b. Manajemen

Terdapat mekanisme evaluasi tiap tiga bulan sekali untuk mengetahui pendapat dan pandangan masyarakat atas tampilan situs yang dibuat oleh Bagian PDE. Hal ini dimaksudkan untuk member layanan terbaik kepada public baik berisi konten, informasi yang tepat bagi masyarakat. Tidak terdapat criteria tertentu yang dibuat Bagian PDE bagi tiap-tiap instansi dalam menampilkan data ataupun informasi yang disajikan dalam situsnya. Riteria yang dipakai adalah ketentuan dari

Kemertian Kominfo yang dijadikan standar bagi pembuatan situs pemerintah daerah di seluruh Indonesia, demikian juga manajemen penyelenggaraan situsnya.

c. Implementasi

Untuk Sistem Informasi Manajemen Kecamatan, misalnya dalam *up-date* realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan setiap minggu pada hari jumat. Terdapat jaringan internal dimana setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Malang terhubung langsung dengan server di Bagian PDE yang menggunakan internet. Sedangkan kecamatan yang tidak bisa terhubung langsung dengan Bagian PDE dikarenakan hambatan geografis terhubung dengan Bagian PDE meelalui jaringan internet dengan system *dial-up* telkomnet instan. Dimana setiap operator kecamatan memiliki nama dan kata kunci (password) khusus.

Bagian Pengelola Data Elektronik secara rutin meminta data dan informasi dari berbagai instansi untuk kemudian diolah oleh staff Bagian PDE dan disajikan kepada public melalui Situs www.malangkab.go.id.

d. Evaluasi

Masyarakat memiliki kesempatan untuk melihat perkembangan pembangunan, proses dan tata cara birokrasi, realisasi proyek yang dilakukan pemerintah serta akses komunikasi dengan pemerintah. Terdapat kecenderungan menuju transparansi dimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di internal instansi pemerintahan daerah.

Kecenderungan yang berkembang di masyarakat dalam memberikan informasi pemerintah dituntut terbuka. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good governance* dimana transparansi dan akuntabilitas public dijunjung tinggi.

4.3.3 Sumber Daya aparatur

4.3.3.1 Peran Sumber Daya Aparatur Dalam Pengolahan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sumber daya aparatur merupakan salah satu aset terpenting bagi organisasi pemerintah. Peranan sumber daya manusia bagi organisasi tidak hanya dilihat dari hasil produktifitas kerja tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keunggulan daya saing manusianya, bukan ditentukan lagi oleh sumber daya alamnya. Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia suatu negara akan semakin kuat daya saing negara tersebut.

Terlebih lagi realitas saat ini, dimana dunia memasuki era globalisasi yang menghadapkan pemerintah daerah pada kondisi persaingan yang sangat tajam tidak hanya dalam ruang lingkup lokal, regional tetapi juga global. Persaingan yang terjadi mengharuskan pemerintahan daerah untuk merubah dan menggeser fungsi – fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administratif semata seperti perekrutan pegawai , staffing, koordiating yang dilakukan oleh kepegawaian. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi di dalam organisasi menjadi aliansi strategik kerja sama. Bersama–sama bagian lainnya mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi pemerintahan.

Pada Bagian Pengelola Data Elektronik peran sumber daya aparatur sangat penting. Sumber daya aparatur menghimpun informasi yang didapat dari seluruh instansi di lingkup Kabupaten Malang maupun dari pusat serta informasi umum yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Kabupaten Malang. Informasi yang didapat dari instansi-instansi di lingkup Kabupaten Malang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan *data base* SKPD. Pengelolaan teknologi informasi juga bisa berupa pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang misalnya, informasi mengenai pembuatan akta kelahiran,KTP, ijin mendirikan bangunan dan lain-lain.

4.3.3.2 Pengembangan Sumber Daya Aparatur Untuk Menunjang Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Pandoyo (1986 : h.77) pengertian pengembangan pegawai adalah usaha – usaha untuk meningkatkan ketrampilan maupun pengetahuan bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien.

Bentuk pengembangan pegawai secara garis besar dibagi menjadi dua pertama pendidikan dan pelatihan kedua mutasi. Pada Bagian Pengelola Data Elektronik pengembangan pegawai dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Diklat merupakan suatu kegiatan organisasi yang penting untuk proses pencapaian tujuan. Diklat juga dapat memperluas wawasan berfikir dan pengetahuan mengenai cara-cara baru yang diperlukan bagi peningkatan produktifitas organisasi.

Pada Bagian PDE diklat berupa seminar mengenai pengembangan informasi, komunikasi dan multimedia seminar ini juga menyangkut kesiapan sumber daya aparatur dapat pemanfaatan keberadaan telecenter yang telah beroperasi di Desa Tirtoyudo melalui dukungan jaringan internet dan website (<http://rctirto.malangkab.go.id>). Komunitas yang akan memanfaatkan jaringan telecenter tirtoyudo sampai radius 30 km, komunitas menyiapkan secara mandiri perangkat penangkap sinyal internet dengan bantuan teknis dari Bagian Pengelola Data Elektronik. Sumber daya aparatur juga mendapatkan pelatihan mengenai pemberdayaan tenaga teknis bidang teknologi informasi bagi SKPD tujuannya adalah untuk mempercepat peningkatan kompetensi staf teknis, menjalankan beberapa produk aplikasi SIM SKPD misalnya dengan entry data pemeliharaan atau back up database SKPD, Merekam sistem berjalan manakala ada pengembangan SIM yang diperlukan SKPD.

4.3.4 Evaluasi Kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik

Setelah melakukan serangkaian wawancara dan Tanya jawab kepada beberapa staf kita dapat mengevaluasi kinerja pada Bagian Pengelola Data Elektronik :

1. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat lokal untuk lebih proaktif mendukung tim yang terlibat dalam pengolahan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dengan tidak adanya payung hukum untuk melindungi dan mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi pada proses yang lebih lanjut. Dari data yang diperoleh untuk menggambarkan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini masih dalam tahap interact
2. Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur dalam, ketrampilan teknis dan non teknis yang menjadi syarat bagi terselenggaranya e-government yang baik hal ini dapat kita lihat dari data sumber daya aparatur di lingkup Bagian PDE. System informasi dan komunikasi membutuhkan skill dan pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang baik.
3. Tidak adanya studi kelayakan proyek mengawali implementasi e-government. Tidak ada standat yang menjadi indicator keberhasilan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam kurun Waktu 2 bulan, sejak 9 Juni 2008 sampai dengan 9 Agustus 2008 terhadap Situs www.malangkab.go.id serta Bagian Pengelola Data Elektronik sebagai institusi pembuatnya dalam kerangka pengelolaan Teknologi informasi dan komunikasi penulis dapat mengambil beberapa hal yang patut diperhatikan berkaitan dengan situs sebagai media awal pengembangan teknologoi informasi ke depan serta sumber daya aparatur sebagai pembuat situs dan merupakan komponen yang penting dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus dapat menjawab tujuan diadakannya penelitian ini. Saya melihat sesuai dengan kondisi di lapangan dalam hal ini Bagian Pengelola Data Elektronik. Kesimpulan yang saya dapat dari penelitian ini adalah :

1. Berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta implementasi *e-government* di Kabupaten Malang, dapat disimpulkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Malang mempunyai kemajuan yang signifikan. Khususnya institusi Bagian Pengelola data Elektronik sebagai pelaksana dari pembuatan *situs* dengan domain www.malangkab.go.id, Sistem Informasi Manajemen, pengolahan data, pemberian layanan informasi untuk evaluasi program dan bahan kebijakan walaupun masih memiliki

beberapa hambatan dan kendala dalam penerapannya di institusi Pemerintahan Kabupaten Malang.

2. Dalam hal peran sumber daya aparatur baik dalam pengelola data, pemberian informasi untuk bahan kebijakan, penyediaan informasi untuk evaluasi program, dan penguasaan teknologi *hardware* dan *software*. Dalam pengelolaan data sumber daya aparatur Bagian Pengelola Data Elektronik sudah mengelola data dengan baik, dimana pada situs resmi Pemerintah Kabupaten Malang informasi yang diinginkan masyarakat sudah bisa didapat dari info tentang kota malang , eksekutif, legeslatif, investasi, potensi kota malang, cuaca, info bursa kerja dan lain-lain
3. Belum adanya kegiatan yang khusus mengevaluasi kemampuan dari sumber daya aparatur, walaupun ada hanya penilaian kinerja pegawai. Evaluasi sumber daya aparatur penting untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai
4. Implikasi pelaksanaan proyek ini bagi masyarakat Kabupaten Malang adalah masyarakat terbantu dengan keberadaan situs ini khususnya dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Malang, dan dapat menjadi media penyalur kritik, masukan, opini, keluhan maupun harapan warga hingga terwujud Pemerintahan Kabupaten Malang yang lebih baik.

1.2 SARAN

Saya akan memberikan model ideal mengenai pengolahan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Malang dikarenakan dinamisnya perkembangan TI sehingga memungkinkan terciptanya sebuah konsep dan metode baru sehingga dapat tercipta system komunikasi masa yang lebih baik dari waktu ke waktu, namun kita dapat meyarankan beberapa hal yang dapat kita sarankan untuk pemerintah Kabupaten Malang dan Bagian KPE yang merupakan pelaksana dari pengolahan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan kesimpulan di atas:

1. Dalam usaha mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Malang, Bagian PDE tidak dapat bergerak sendiri, namun harus banyak bekerja sama dengan instansi lainnya di lingkup Kabupaten Malang karena bekerjasama dengan instansi-instansi dapat menambah informasi bagi masyarakat, serta mampu memberi gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di pemerintahan. Masyarakat juga dapat menambah wawasan tentang Kabupaten Malang khususnya.
2. Pengolahan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat masyarakat mengenal pemerintahnya sendiri. Pemerintah harusnya juga terbuka kepada masyarakat pada ide-ide kreatif masyarakat yang dapat mengeluarkan potensi-potensi positif untuk perbaikan system secara keseluruhan dan perkembangan Kabupaten Malang ke depan.
3. Sebagai masyarakat juga harus kreatif menanggapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sehingga dapat tercipta hubungan sinergis untuk perkembangan Kabupaten Malang.



DAFTAR PUSTAKA

Basuki, Sulisty. 1998 . *Dasar Dasar Teknologi Informasi* . Jakarta : Universitas Terbuka.

Cordosa, Gomes, Faustino. 1995 . *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta : Andi Offset .

Davis. B. Gordon . 2002 . *Kerangka Dasar Sistem Informasi Volume I* . Jakarta : Pustaka Binama Pressindo .

Hasibuan, Malayu S.P. 1990 . *Manajemrn Sumber Daya Manusia Dasar Kunci Keberhasilan*. Jakarta : CV Haji Mas Agung.

Hasibuan. H Malayu. 2002 . 2002 . *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : PT Bumi Aksara .

Hadari, Nawawi. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Indrajit, Rishardus Eko. 2002 . *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* . Yogyakarta : Andi Offset.

Kristiadi, JB. *KebijakanPerbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat* . Jakarta .

Miles dan Huberman A.M. 1992 . *Analisis Dalam Kualitatif terjemahan* . Jakarta : Universitas Indonesia Press .

Moenir, H.A.S . 1998 . *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* . Jakarta : Bumi Aksara .

Moleong, Lexy J. 2006 . *Metodologi Penelitian Edisi Revisi II* . Bandung : PT Rosdakarya .

Moekiyat, Drs. 1991. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Jakarta: CV Mandar Maju

Musanef, Drs . 1998 . *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* . Jakarta : PT Gunung Agung .

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional . 2002 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III* . Balai Pustaka . Jakarta .

Pasolong, Harbani. 2007 . *Teori Administrasi Publik* . Bandung : Alfabeta .

Raharjo, Budi. 2002 . *Memahami Teknologi Informasi* . Jakarta : PT Elex Media Komputindo .

Ratminto, dan Atik Septi Winarsih . 2005 . *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Karakter dan Standar Pelayanan Minimal* . Yogyakarta : Pustaka Belajar .

Ranu Pandoyo , dan Suad Husnan . 1986 . *Manajemen Personalia Edisi Ke III* . Yogyakarta : BPPE .

Siagian, P Sondang . 1991 . *Peran Staf Dalam Manajemen* . Jakarta : CV Haji Mas Agung .

Sugiyono . 2008 . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* . Bandung : ALFABETA cv

Simamora, Henry . 1995 . *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta : STIE YKPN .

Toha, Miftah. 2000. *Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* . Jakarta : UI-PRESS

_____ , Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

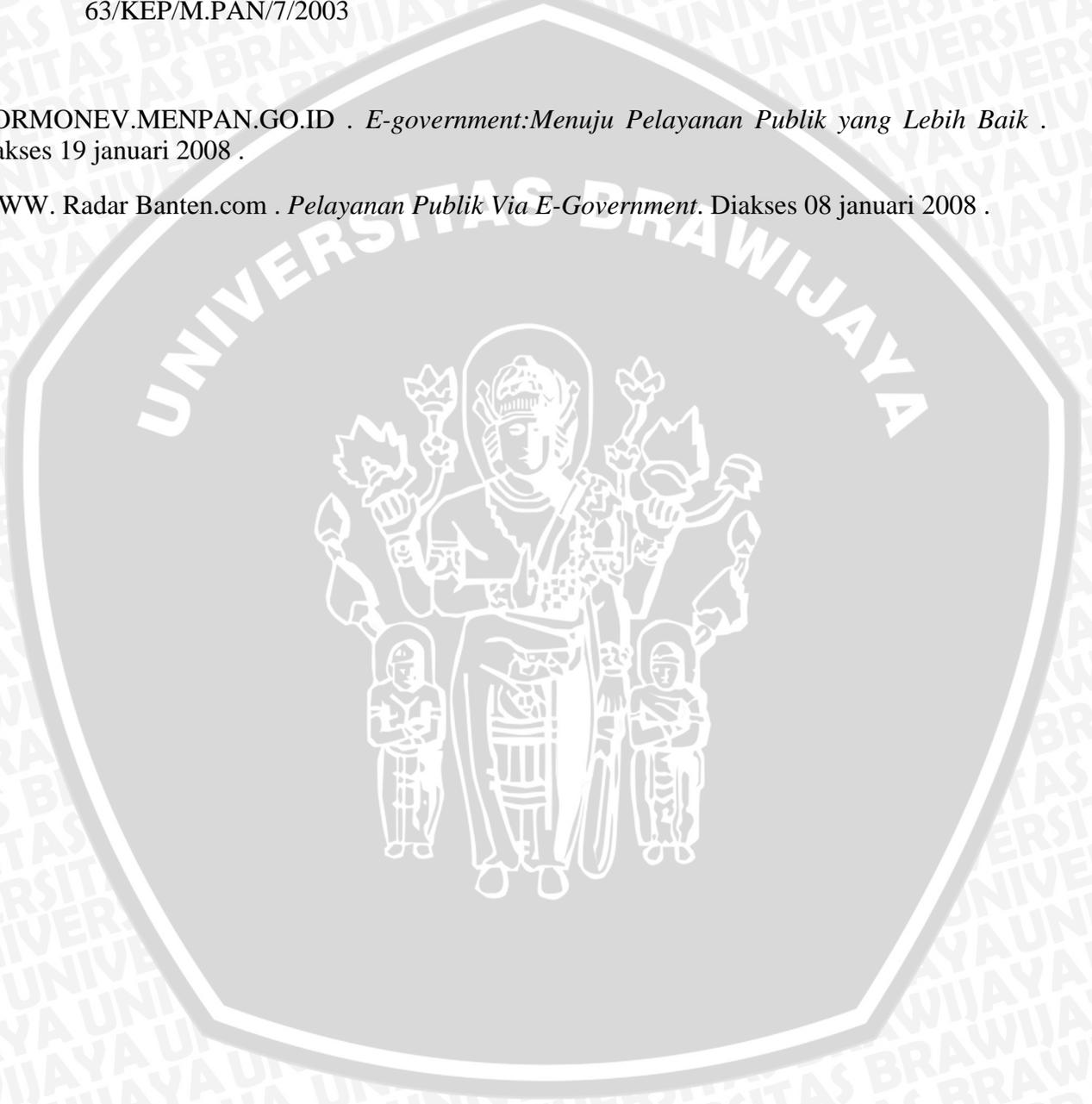
_____ , Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

_____, INPRES Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*

_____, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

KORMONEV.MENPAN.GO.ID . *E-government: Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik* . diakses 19 januari 2008 .

WWW.RadarBanten.com . *Pelayanan Publik Via E-Government*. Diakses 08 januari 2008 .



Instansi-Instansi Pemerintah Kabupaten Malang**a. Dinas****Dinas Pendidikan**

Alamat : Jl.Panarukan No. 1 Kapanjen
No.Telp : (0341) 393935-37
Email : dispendik@malangkab.go.id

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Alamat : Jl. Trunojoyo Kav. 6, Kapanjen
No.Telp : (0341) 399989
Email : dispورا@malangkab.go.id

Dinas Kesehatan

Alamat : Jl. Panji No. 120, Kapanjen
No.Telp : (0341) 393730, 393731, 393732, 393736
Email : dinkes@malangkab.go.id

Dinas Sosial

Alamat : Jl. Majapahit No.5 Malang
No.Telp : (0341) 362601
Email : dinsos@malangkab.go.id

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Alamat : Jl.Trunojoyo Kav. 3 Kapanjen
No.Telp : (0341) 393933-34, Fax. 393932
Email : disnaker@malangkab.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Alamat : Jl.Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 350888
Email : dishub@malangkab.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Alamat : Jl. Panji No119, Kapanjen
No.Telp : (0341) 394100
Email : dispenduk@malangkab.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Alamat : Jl. Raya Singosari, Malang
No.Telp : (0341) 456644
Email : disbudpar@malangkab.go.id

Dinas Bina Marga

Alamat : Jl. KH. Agus Salim No.7 Malang
No.Telp : (0341) 361160
Email : binamarga@malangkab.go.id

Dinas Pengairan

Alamat : Jl. Kawi No. 1, Kepanjen
No.Telp : (0341) 395025, 393944
Email : pengairan@malangkab.go.id

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

Alamat : Jl. KH Agus Salim No.7 Malang
No.Telp : (0341) 351436, 328496, 325564, 346474
Email : ciptakarya@malangkab.go.id

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar

Alamat : Jl. Trunojoyo Kav. 6, Kepanjen
No.Telp : (0341) 391673, 391676, 391674
Email : disperindag@malangkab.go.id

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Alamat : Jl. Trunojoyo Kav. 1, Kepanjen
No.Telp : (0341) 393921, Fax. 393922
Email : dinkop@malangkab.go.id

Dinas Pertanian Dan Perkebunan

Alamat : Jl. Sumedang No. 28 Kepanjen
No.Telp : (0341) 396893, 395749
Email : distanbun@malangkab.go.id

Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral

Alamat : Jl. A. Yani Utara No. 384B Malang
No.Telp : (0341) 408788
Email : esdm@malangkab.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jl. Trunojoyo Kav. 6, Kepanjen
No.Telp : (0341) 391678
Email : kelautan@malangkab.go.id

Dinas Kehutanan

Alamat : Jl. Raya Genengan KM. 9,3, Pakisaji Malang
No.Telp : (0341) 806454
Email : kehutanan@malangkab.go.id

Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan

Alamat : Jl. Trunojoyo Kav. 4 Kepanjen
No.Telp : (0341) 393926
Email : peternakan@malangkab.go.id

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset

Alamat : Jl. KH.Agus Salim No.7 Malang
No.Telp : (0341) 362372 Fax. 355708
Email : dppka@malangkab.go.id

Unit Pelayanan Terpadu Perizinan

Alamat : Jl. Trunojoyo Kav. 6, Kepanjen
No.Telp : (0341) 396633
Email : perizinan@malangkab.go.id

b.Badan**Inspektorat Kabupaten**

Alamat : JL. Raya Mondoroko No 17B Singosari -Malang
No.Telp : (0341) 451905
Email : inspektorat@malangkab.go.id

Badan Kepegawaian Daerah

Alamat : Jl. KH.Agus Salim No.7 Malang
No.Telp : (0341) 364776, 353375
Email : bkd@malangkab.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan

Alamat : Jl.KH Agus Salim No7 Malang
No.Telp : (0314) 352210, 361006, 357471
Email : bappekab@malangkab.go.id

Badan Penelitian Dan Pengembangan

Alamat : Jl.KH Agus Salim No 7 Malang
No.Telp : (0341) 369390
Email : balitbang@malangkab.go.id

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat : Jl.KH. Agus Salim No.7 Malang
No.Telp : (0341) 366260
Email : bakesbangpol@malangkab.go.id

Badan Lingkungan Hidup

Alamat : Jl. Trunojoyo Kav. 1, Kapanjen
No.Telp : (0341) 393924
Email : lh@malangkab.go.id

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Alamat : Jl. Sumedang No. 28, Kapanjen
No.Telp : (0341) 393676
Email : pangan@malangkab.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Alamat : Jl Panji No.119 Kapanjen
No.Telp : (0341) 399755, 396118
Email : bpm@malangkab.go.id

Badan Pendidikan Dan Pelatihan

Alamat : Jl. Trunojoyo, Kapanjen
No.Telp : (0341) 393931
Email : diklat@malangkab.go.id

Badan Keluarga Berencana

Alamat : Jl. Trunojoyo, Kapanjen
No.Telp :
Email : kb@malangkab.go.id

Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 19, Kapanjen
No.Telp : (0341) 397789
Email : perpustakaan@malangkab.go.id

c.Kantor**Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**

Alamat : Jl. Merdeka Timur N0.3 Malang
No.Telp : (0341) 350722
Email : satpolpp@malangkab.go.id

Kantor Penanaman Modal

Alamat : Jl. Nusa Barong No.13, Malang
No.Telp : (0341) 355858
Email : kpm@malangkab.go.id

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat : Jl. Merdeka Timur No. 3, Malang
No.Telp : (0341) 346682
Email : kpppa@malangkab.go.id

Kantor Perumahan

Alamat : Jl. Nusa Barong No. 13
No.Telp : (0341) 341894
Email : perumahan@malangkab.go.id

d.Bagian**Bagian Tata Pemerintahan Umum**

Alamat : Jl. Merdeka Timur No3 Malang
No.Telp : (0341) 352454
Email : bag-tapum@malangkab.go.id

Bagian Tata Pemerintahan Desa

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 336392
Email : bag-tapemdes@malangkab.go.id

Bagian Pertanahan

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp :
Email : bag-pertanahan@malangkab.go.id

Bagian Hukum

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 350723
Email : bag-hukum@malangkab.go.id

Bagian Perekonomian

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 362505
Email : mailto:bag-ekonomi@malangkabkab.go.id

Bagian Kerjasama

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 336339
Email : bag-kerjasama@malangkab.go.id

Bagian Administrasi Pembangunan

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 364551
Email : bag-pembangunan@malangkab.go.id

Bagian Pengelola Data Elektronik

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 340919
Email : bag-pde@malangkab.go.id

Bagian Umum dan Protokol

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 353355, 326793
Email : bag-umum@malangkab.go.id

Bagian Tata Usaha

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 362209, 343154
Email : bag-tu@malangkab.go.id

Bagian Hubungan Masyarakat

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 348431
Email : bag-humas@malangkab.go.id

Bagian Organisasi

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp : (0341) 365378
Email : bag-organisasi@malangkab.go.id

Bagian Bina Mental dan Kerohanian

Alamat : Jl. Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp :
Email : bag-bintal@malangkab.go.id

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Alamat : Jl.Merdeka Timur No.3 Malang
No.Telp :
Email : bag-kesra@malangkab.go.id

e.Kecamatan**Ampelgading**

Alamat : Jl. Raya Tirtomarto No.67 Ampelgading
No.Tlp : 851001
Email : ampelgading@malangkab.go.id

Bantur

Alamat : Jl. Raya Bantur No.1460 Bantur
No.Tlp : 841240
Email : bantur@malangkab.go.id

Bululawang

Alamat : Jl. Suropati No. 6 Bululawang
No.Tlp : 833003
Email : bululawang@malangkab.go.id

Dampit

Alamat : Jl. Semeru Selatan No.23 Dampit
No.Tlp : 896401
Email : dampit@malangkab.go.id

Dau

Alamat : Jl. Raya Mulyoagung No.200 Dau
No.Tlp : 462764
Email : dau@malangkab.go.id

Donomulyo

Alamat : Jl. Raya Donomulyo No.62 Donomulyo
No.Tlp : 881009
Email : donomulyo@malangkab.go.id

Gedangan

Alamat : Jl. Raya Hasanudin No.180 Gedangan
No.Tlp : 871126
Email : gedangan@malangkab.go.id

Gondanglegi

Alamat : Jl. Diponegoro No 76 Gondanglegi
No.Tlp : 879209
Email : gondanglegi@malangkab.go.id

Jabung

Alamat : Jl. Raya Kemantren N0.22 Jabung
No.Tlp : 792132
Email : jabung@malangkab.go.id

Kalipare

Alamat : Jl. Raya Kalipare No.902 Kalipare
No.Tlp : 311234
Email : kalipare@malangkab.go.id

Karangploso

Alamat : Jl. Kertanegara No.1 Karangploso
No.Tlp : 461626
Email : karangploso@malangkab.go.id

Kasembon

Alamat : Jl. Raya Kasembon No 7 Kasembon
No.Tlp : 326418
Email : kasembon@malangkab.go.id

Kepanjen

Alamat : Jl. Kawi No.50 Kepanjen
No.Tlp : 395006
Email : kepanjen@malangkab.go.id

Kromengan

Alamat : Jl. Nailun Selatan No.85 Kromengan
No.Tlp : 385069
Email : kromengan@malangkab.go.id

Lawang

Alamat : Jl. MH.Thamrin No.2 Lawang
No.Tlp : 426065
Email : lawang@malangkab.go.id

Ngajum

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.76 Ngajum
No.Tlp : 396630
Email : ngajum@malangkab.go.id

Ngantang

Alamat : Jl. Raya Ngantang No.68 Ngantang
No.Tlp : 521155
Email : ngantang@malangkab.go.id

Pagak

Alamat : Jl. Abdul Rajak No.1 Pagak
No.Tlp : 311123
Email : pagak@malangkab.go.id

Pagelaran

Alamat : Jl. Suropati No.54 Pagelaran
No.Tlp : 879429
Email : pagelaran@malangkab.go.id

Pakis

Alamat : Jl. Raya Pakis No.69 Pakis
No.Tlp : 791548
Email : pakis@malangkab.go.id

Pakisaji

Alamat : Jl. Pakisaji No.32
No.Tlp : 801286
Email : pakisaji@malangkab.go.id

Poncokusumo

Alamat : Jl. Wonorejo No.4 Poncokusumo
No.Tlp : 787666
Email : poncokusumo@malangkab.go.id

Pujon

Alamat : Jl. Brigjend Abdul Manan No.8 Pujon
No.Tlp : 524001
Email : pujon@malangkab.go.id

Sumbermanjing Wetan

Alamat : Jl. Raya Argotirto No.88 Sumbermanjing Wetan
No.Tlp : 871122

Email : sumbermanjingwetan@malangkab.go.id

Singosari

Alamat : Jl. Tumapel No.38 Singosari

No.Tlp : 458009

Email : singosari@malangkab.go.id

Sumberpucung

Alamat : Jl. Jend.Sudirman No.227 Sumberpucung

No.Tlp : 385202

Email : sumberpucung@malangkab.go.id

Tajinan

Alamat : Jl. Raya Tajinan No.18 Tajinan

No.Tlp : 751287

Email : tajinan@malangkab.go.id

Tirtoyudo

Alamat : Jl. Raya Tlogosari No.457 Tirtoyudo

No.Tlp : 898606

Email : tirtoyudo@malangkab.go.id

Tumpang

Alamat : Jl. Tunggul Ametung No.5 Tumpang

No.Tlp : 787211

Email : tumpang@malangkab.go.id

Turen

Alamat : Jl. Tlogosari No.457 Turen

No.Tlp : 898606

Email : turen@malangkab.go.id

Wagir

Alamat : Jl. Raya Parangargo No.54 Wagir

No.Tlp : 804662

Email : wagir@malangkab.go.id

Wajak

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.96 Wajak

No.Tlp : 827759

Email : wajak@malangkab.go.id

Wonosari

Alamat : Jl. Raya Gunung Kawi No.10 Wonosari

No.Tlp : 370041

Email : wonosari@malangkab.go.id

